

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum diberlakukannya politik etis di Hindia Belanda, perempuan yang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan tidaklah banyak. Kesempatan itu pun hadir tidak lain karena adanya *privilege* sebagai anak Bupati atau jabatan sejenisnya. Anak seorang Bupati Jepara, Kartini telah memperoleh pendidikan barat meskipun hanya di tingkat *Europeesche Lagere School*.¹ Pada tingkatan itu pun, Kartini telah cukup mampu menguasai Bahasa Belanda yang di kemudian hari dijadikannya sebagai modal berkomunikasi dan mengenal peradaban barat.

Pada akhir abad ke 19 (menuju awal abad 20), Kartini dalam surat-suratnya menyatakan sekaligus menggambarkan kondisi perempuan di Jawa, dengan dirinya sendiri sebagai contoh yang begitu dekat. Meskipun Kartini “diizinkan” untuk menempuh sekolah dasar, hal yang timpang terjadi ketika saudara laki-laknya mendapatkan akses untuk menempuh pendidikan di negeri Belanda langsung. Kartini tidak bisa seperti itu, ia harus menempuh fase “pingit” untuk perempuan Jawa yang telah berusia 12 tahun, yang diibaratkannya sebagai sangkar emas². Pingitan telah sangat membatasinya untuk menikmati masa muda dan mengenal dunia luar.

Meski begitu, Kartini menaruh perhatian yang sangat besar pada pendidikan. Baginya, pendidikan adalah modal yang penting untuk menata suatu peradaban, pendidikan perempuan menuju kesetaraan.³ Hal ini tentu berkaitan dengan hak seluruh manusia untuk memperoleh kehidupan yang layak serta akses untuk pendidikan, tidak terkecuali perempuan. Tanpa harus dibatasi hak-haknya apalagi dimarginalkan dan disubordinasi.

¹Silvy Mei Pradita, “Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19–20: Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa.” *Chronologia: of History Education* 2, no. 2 (2020): 12-27. [i.org/10.22236/jhe.v2i2.6060](https://doi.org/10.22236/jhe.v2i2.6060).

²Kartini, R.A. *Emansipasi: Surat-surat Kepada Bangsaanya 1899–1904*.

³Sulastin Sutrisno. Yogyakarta: Jalasutra, 2014, 3.

⁴Pradita, “Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia”, 18.



Pada awal abad 20, kalangan terdidik pribumi mulai banyak bermunculan di permukaan. Era ini banyak dikenal sebagai era Kebangkitan Nasional. Mereka hadir dengan ide, gagasan dan yang terpenting adalah gerakan. Uniknya, kaum intelektual ini bergerak secara kolektif dengan menggunakan “organisasi/partai”nya sebagai kendaraan. Merereka sadar bahwa sudah diperlukan suatu perkumpulan atau organisasi untuk memperjuangkan cita-cita mereka. Banyak dari mereka juga ikut mendirikan bagian Perempuan, di antaranya adalah *Indische Partij*, Budi Utomo (dekat dengan Poetri Mardika), Sarekat Islam (Sarekat Perempuan Islam Indonesia), Muhammadiyah (Aisyiyah), dan lainnya.⁴

Organisasi Perempuan awal, Poetri Mardika adalah perkumpulan Perempuan yang menaruh perhatian terhadap nasib Perempuan. Poetri Mardika pun bergerak meningkatkan taraf hidup Perempuan melalui Pendidikan kebudayaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan didirikannya Surat Kabar Poetri Mardika yang bertujuan untuk menunjang wawasan literasi perempuan, juga memberikan beasiswa pendidikan untuk Perempuan.

Dari barisan Muslim, ‘*Aisyiah* (1917) misalnya, berusaha memperjuangkan derajat dan cita-cita perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Usaha memberdayakan perempuan dilakukannya dengan bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM. Aisyiah dan Muhammadiyah, potret bagaimana suatu lembaga telah memiliki upaya tentang derajat perempuan, serta ide untuk terjun ke ruang non domestik.⁵

Timbulnya kesadaran publik (juga politik) kaum Perempuan, beriringan dengan kesadaran nasionalisme. Dan memang benar bahwa ide pembebasan perempuan tidak bisa dilepaskan dengan pembentukan kesadaran kebangsaan (nasionalisme). Seorang tokoh pergerakan, Sri Sulandari Mangunsarkoro berpendapat bahwa perlunya terjun langsung dalam areal politik untuk



⁴Restu Dini Yanti, “Potret Gerakan Perempuan pada Abad Ke 20 di Batavia: Mardika 1912,” *Historia: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 3, no. 2 35–44, <https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.23001>.

⁵Liska Aulia, “Peran Perempuan dalam Organisasi ‘Aisyiah (Studi Living ada Pimpinan Wilayah Aisyiah Banten),” *Holistic al-Hadis* 4, no. 2 (2018): 4, <https://doi.org/10.32678/holistic.v4i2.3227>.

memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Tahun 1941, bersama Ny. Sunaryo Mangunpuspito di hadapan Tuan (Komisi) Visman. Ny. Sunaryo menginginkan Indonesia berparlemen, lain hal dengan Ny. Sri Mangunsarkoro yang menuntut Indonesia Merdeka.⁶ Merdeka menurutnya bukan hanya soal pamitnya para penjajah dari suatu negeri, melainkan merdeka dari kungkungan sistem patriarki. Inilah yang di kemudian hari beliau maksud sebagai kemerdekaan 100%. Kemerdekaan secara politik, ekonomi dan sosial.

Pada tanggal 06 September 1946 di Yogyakarta didirikanlah Partai Wanita Rakyat (PWR) atas prakarsa Sri Mangunsarkoro, Nyi. M.D Hadiprabowo dan Ni. Sri Umyati dari Barisan Buruh Wanita.⁷ PWR bertujuan untuk *“mencapai susunan masyarakat yang sosialis atas dasar ketuhanan yang bisa menjamin hidup bahagia lahir dan batin (religieus socialisme)”*.⁸ Dengan kata lain, ideologi yang dituju adalah sosialisme religious, kemerdekaan 100% yang cita-cita menuju keadilan sosial dan kesetaraan gender. Pada awal pembentukannya, PWR memiliki basis anggota yang berasal dari organisasi seperti Wanita Taman Siswa, Perwari, dan Barisan Buruh Wanita. Sebagai satu-satunya partai yang seluruhnya dijalankan oleh perempuan, partai ini merupakan perkumpulan perempuan visioner yang memiliki cita-cita kemerdekaan. PWR memperjuangkan hak kemanusiaan perempuan dan monogami.⁹

Sri Mangunsarkoro selaku pendiri partai sekaligus ketua 1 Partai Wanita Rakyat ini berpendapat bahwa kepentingan perempuan secara nasional, tidak akan begitu ampuh apabila diperjuangkan lewat gerakan sosial saja. Diperlukan terjun dan terlibat langsung dalam dinamika dan atau sebagai penentu kebijakan politik nasional.¹⁰ Pada malam penutupan Kongres Partai Wanita Rakyat tahun 1951, ia

⁶ Dewi Astuti, *“Sri Mangunsarkoro: Tokoh Pergerakan Perempuan Indonesia 1924–1959”* (Skripsi, Universitas Indonesia, 2003), 113.

⁷ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Kepartaian di Indonesia* (Yogyakarta: Kementerian Penerangan RI, 1950), 131.

Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Kepartaian dan Wanita di Indonesia* (Yogyakarta: Kementerian Penerangan RI, 1954), 182. Doel: Opheffing Positie de Vrouwen (Demokratisatie Dien te Worden r”), ’Indische courant voor Nederland’ 11-09-1951). Astuti, *“Sri Mangunsarkoro”*, 113.



menuntut agar perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam areal politik.¹¹

Sebelumnya, pada tanggal 28 Agustus- 2 September 1949 di Yogyakarta diadakan Musyawarah Wanita Seluruh Indonesia. Dalam permusyawaratan tersebut, nampak bahwa secara umum gerakan wanita di Indonesia telah semakin melek untuk menyesuaikan dirinya dalam situasi dan kondisi politik. Sebanyak 82 organisasi Perempuan turut dalam agenda musyawarah ini. Adapun beberapa hal yang menjadi putusan musyawarah yakni menuntut kemerdekaan penuh dalam bidang politik dan ekonomi, mempertegas identitas kebangsaan dengan mendukung resolusi Kongres Pemuda 1949, berikrar untuk turut melanjutkan perjuangan mencapai kemerdekaan apapun kondisinya, memprotes aksi-aksi tidak manusiawi yang dilakukan oleh tentara Belanda dan lain-lain.¹²

Pasca kemerdekaan, memang telah menjamur partai politik yang sebagian besarnya memiliki sayap Perempuan atau bagian perempuannya. Didirikan pada tahun yang sama dengan PWR, *Nahdatul Ulama Muslimat* misalnya, adalah *underbow* dari Nahdatul Ulama. Muslimat bertujuan mengangkat derajat wanita dengan mengikutsertakan kaum wanita dalam organisasinya. Hal ini adalah salah satu metode kaderisasi NU guna untuk pengabdian terhadap agama, bangsa dan negara.¹³

Adapun Partai Wanita Rakyat menjadi special untuk diketahui lebih dekat, sebab memiliki kesadaran untuk terjun secara kolektif gerakan dalam areal politik, sektor yang seringkali dianggap sebagai sektor laki-laki. Secara structural, PWR bukanlah sebagai bagian perempuan atau *underbow* suatu organisasi atau partai politik. Ia dapat disebut sebagai cerminan kesadaran politik Perempuan Indonesia.

¹¹“Vrouwenorganisatie Tegen Invloeden Van Buiten”, Indische courant voor Nederland, 15-09-1951.

¹² Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan an Wanita Indonesia, 22 Desember 1928 – 22 Desember 1958* (Jakarta: en Penerangan, 1959), 43

Abdul Hafiz dan Muhammad Sungaidi, “Pemberdayaan Perempuan muslimat NU,” *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan* 25, vember 2021): 196, <https://doi.org/10.15408/dakwah.v25i2.23238>.



Tak hanya itu, di sepanjang periode revolusi kemerdekaan misalnya, PWR telah menjadi representasi gerakan perempuan yang militant dan oposisional.

Hal lain yang dapat dilihat dari PWR adalah ia menuntut pemerintah Indonesia agar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dijadikan landasan dan UUD Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dilaksanakan, serta menuntut pula agar hasil Konferensi Meja Bundar tidak dilaksanakan.¹⁴ Konteksnya ialah PWR menentang hasil KMB yang membuat Indonesia menjadi negara serikat Uni-Belanda bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Azas dan tujuan Partai Wanita Rakyat setidaknya memiliki kesamaan dengan Perwari, tetapi Partai Wanita Rakyat menambahkan ruang politik sebagai areal perjuangan perempuan.¹⁵

Pada periode awal dibentuknya, PWR menggagas beberapa poin yang menjadi urgensi perjuangannya, seperti mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan monogami, memberantas kapitalisme, imperialisme dan fasisme, menuntut hak dipilih dan memilih, serta menuntut pula regulasi (Undang-undang) yang mengatur perkawinan, pendidikan dan perburuhan bagi masyarakat secara umum dan kaum perempuan secara khusus, dan lain sebagainya¹⁶. PWR di bawah pimpinan Sri Mangunsarkoro menjadi dekat dengan mantan komunis kawakan, Tan Malaka beserta pengikutnya dalam Persatuan Perjuangan. Ide-ide seperti “Kemerdekaan 100%”, pemerintahan rakyat, konfrontasi total dan penolakan terhadap diplomasi, adalah hal yang akrab di kalangan Tan Malaka cs. termasuk PWR. Partai Wanita Rakyat dalam keberjalanan revolusi, memilih bergabung dengan *platform-platform* politik yang menentang kebijakan diplomasi pemerintah, di antaranya Benteng Republik, Gerakan Revolusi Rakyat dan Panitia Kongres Rakyat. Indonesia, Benteng Republik dan Gerakan Revolusi Rakyat.

¹⁴Kementerian Penerangan RI, *Kepartaian dan Parlementaria Indonesia*, 178.

¹⁵Kementerian Penerangan RI, *Kepartaian dan Parlementaria Indonesia*,

Arsip Nasional Republik Indonesia, Inventaris Arsip Sekretariat Negara 1949, No. 1018, “Wakil Setneg kepada Menteri Kehakiman: tentang Partai rakyat meminta kursi di BP KNIP,” 1 Desember 1949.



Dalam arena politik formal (Praktis) , PWR juga mencoba peruntungan dengan ikut sebagai kandidat pemilu DPRD Yogyakarta 1951 dan Pemilu DPR serta Dewan Konstituante 1955. Meskipun kemudian belum berhasil mendapatkan kursi di kedua kontestasi tersebut. Sebelumnya, PWR meletakkan 3 orang perwakilannya untuk duduk di parlemen awal yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Di antaranya adalah Ny. Sri Mangunsarkoro, Ny. Darmiyati M.Hadiprobowo dan Ny. Siti Danilah.¹⁷

1.2 Batasan Masalah

a. Batasan Spasial

Terfokusnya penelitian ini pada wilayah Indonesia sebab Partai Wanita Rakyat adalah partai yang berasaskan kebangsaan yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah nasional. Wilayah yang menjadi perhatian perjuangannya tidak hanya berfokus di Yogyakarta dan sekitarnya, melainkan wilayah Indonesia sebagai areal perjuangan politik.

b. Batasan Temporal

Batasan temporal dalam penelitian ini adalah antara tahun 1946-1959. Tahun 1946 menjadi titik berangkat penelitian ini sebab pada tahun inilah Partai Wanita Rakyat didirikan oleh Sri Mangunsarkoro. Sedangkan tahun 1959 ditandai dengan wafatnya mantan ketua sekaligus tokoh sentral PWR, yakni Sri Mangunsarkoro. Kepergian Sri Mangunsarkoro ini perlahan menyurutkan aktivitas partai dan akhirnya PWR berangsur bubar.

c. Batasan Tematik

Penelitian ini akan berfokus untuk memotret gerakan perempuan pasca kemerdekaan tentang bagaimana suatu kelompok perempuan telah memiliki kesadaran dan cita-cita yang membawanya terjun ke ruang publik, terkhusus areal

adapun bahasan penelitian ini akan dibatasi dengan penjelasan tentang perempuan Indonesia sebagai salah satu implikasi dari munculnya kaum



Astuti 'Sri Magunsarkoro'' Lampiran 5,

intelektual pribumi di awal abad 20. Yang paling penting adalah bahasan mengenai bagaimana Partai Wanita Rakyat berkiprah dan menunjukkan sikap politiknya dengan merespon setiap kebijakan politik yang lahir di negara Republik Indonesia pada masa-masa revolusi sampai pada akhir periode demokrasi parlementer.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diturunkan beberapa pertanyaan penelitian, di antaranya sebagai berikut.

1. Mengapa Sri Mangunsarkoro mendirikan Partai Wanita Rakyat ?
2. Bagaimana kiprah Partai Wanita Rakyat dalam panggung politik di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- 1.4.1 Menelisik faktor-faktor yang melatar-belakangi perjuangan politik Partai Wanita Rakyat
- 1.4.2 Melacak aktivitas dan kiprah Partai Wanita Rakyat dalam panggung politik di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1.5.1 Memberikan gambaran tentang latar belakang perjuangan politik Partai Wanita Rakyat, juga informasi tentang bagaimana partai ini melakukan aktivitasnya dan usahanya dalam memperjuangkan hak perempuan melalui areal politik.
- 1.5.2 Memperkaya kepustakaan mengenai sejarah gerakan perempuan Indonesia pasca kemerdekaan.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan berguna untuk melacak apakah topik atau tema yang sudah pernah diangkat sebagai penelitian atau tulisan oleh peneliti lain. Untuk mengetahui hal apa saja dari penelitian sebelumnya yang belum dikaji



atau dibahas. Itulah yang disebut *gap* penelitian. Adapun buku-buku yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Buku *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian* karya Cora Vreede-De Stuers membahas posisi perempuan dalam sejarah Indonesia, khususnya keterbatasan mereka di ruang publik akibat pengaruh hukum adat. Buku ini juga menyoroti munculnya pelopor gerakan perempuan serta perjuangan awal perempuan untuk terlibat dalam bidang politik. Cora Vreede-De Stuers menyebutkan bahwa Partai Wanita Rakyat¹⁸ adalah potret bentuk konkret perjuangan perempuan dalam memperjuangkan hak politik dan keterwakilan di parlemen. Informasi ini relevan dengan penelitian mengenai PWR, karena memberikan konteks historis tentang latar belakang sosial-politik kemunculan partai tersebut serta peran strategisnya dalam mendorong keterlibatan perempuan di ranah politik Indonesia pascakemerdekaan.

Buku *Kepartaian dan Parlemen di Indonesia* yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan pada tahun 1951 dan 1954 memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika partai politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah penjelasan mengenai Maklumat Wakil Presiden RI Tahun 1945, yang menjadi dasar hukum pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Buku ini menjadi sumber penting bagi penelitian mengenai Partai Wanita Rakyat (PWR)¹⁹ karena memuat data tentang Anggaran Dasar, arah perjuangan, dan sikap politik PWR, serta perbandingannya dengan partai-partai lain seperti PKI, PNI, dan Partai Murba. Informasi ini memperkaya analisis mengenai posisi PWR dalam lanskap politik nasional dan memperlihatkan bagaimana partai ini membangun identitas dan orientasi perjuangannya di tengah dominasi partai-partai besar.

Buku *Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 22 Desember 1928 – 22 Desember 1958*, yang diterbitkan oleh Kementerian



Cora Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan an* (Depok: Komunitas Bambu, 2008), 176-177.

Kementerian Penerangan *Kepartaian di Indonesia*, 173-181

Penerangan pada tahun 1958, merekam perjalanan panjang gerakan perempuan Indonesia sejak Kongres Perempuan Pertama di Bandung tahun 1928 hingga dua dekade pascakemerdekaan. Buku ini memberikan gambaran tentang perkembangan organisasi-organisasi perempuan yang tergabung dalam KOWANI, termasuk agenda perjuangan, hasil kongres, serta bentuk-bentuk keterlibatan mereka dalam kehidupan berbangsa.

Selain isi pembahasan kongres, buku ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting seperti Anggaran Dasar dan struktur organisasi, serta dokumentasi foto.²⁰ Bagi penelitian mengenai Partai Wanita Rakyat (PWR), buku ini memberikan konteks penting tentang perkembangan organisasi perempuan secara nasional, serta posisi PWR dalam jaringan perjuangan perempuan yang lebih luas.

Buku '*Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia*' Jilid 1-4 yang ditulis oleh Harry A. Poeze, sangat membantu membaca konteks historis Partai Wanita Rakyat dan sikapnya di sepanjang masa revolusi. Poeze menguraikan hubungan Tan Malaka dengan berbagai organisasi kiri yang aktif pada saat itu, seperti Persatoean Perjoengan, Benteng Republik, Gerakan Revolusi Rakyat, dan Panitia Kongres Rakyat. Dalam pembahasan tersebut, nama Sri Mangunsarkoro muncul sebagai tokoh yang memiliki kedekatan ideologis maupun gerakan dengan Tan Malaka dan simpatisannya. Keterlibatan Sri Mangunsarkoro dalam KNIP serta dalam berbagai gabungan politik tersebut menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pendidik, tetapi juga figur penting dalam arus politik revolusioner.

Buku Deliar Noer dan Akbarsyah yang berjudul *Komite Nasional Indonesia Pusat: Parlemen Indonesia 1945–1950* menjelaskan secara lengkap bagaimana peran KNIP sebagai lembaga legislatif²¹ sebelum adanya DPR. Dalam masa awal kemerdekaan, KNIP berfungsi seperti parlemen dan ikut menentukan arah kebijakan negara. Buku ini memberikan *framing* yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hal itu disebabkan buku ini mampu menjelaskan secara terstruktur



Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 337.

Deliar Noer dan Akbarsyah, *KNIP: Komite Nasional Indonesia Pusat* (Yayasan Obor Indonesia, 2005), 75–76.

tentang parlemen KNIP, sebagai ruang tempat Sri Mangunsarkoro dan Partai Wanita Rakyat belajar berpolitik dan berparlemen. Informasi dari buku ini sangat berguna sebagai latar belakang untuk memahami kondisi politik saat itu, termasuk bagaimana kelompok atau partai politik—seperti Partai Wanita Rakyat—ikut bergerak dalam sistem yang sedang berkembang.

1.6.2 Landasan Konseptual

Penelitian ini bersandar pada tiga gagasan utama: perempuan dan politik, kesadaran gender, serta partisipasi perempuan dalam dunia politik. Ketiga kerangka ini membantu melihat bagaimana perempuan Indonesia dalam hal ini Partai Wanita Rakyat hadir dalam ruang politik. Lewat studi kasus ini, dapat dilacak bagaimana suara dan kepentingan perempuan di masa revolusi dan Demokrasi Terpimpin dipraktekkan dituangkan melalui gerakan dan sikap politiknya dalam setiap agenda di sepanjang periode tersebut.

A. Perempuan dan Politik

Politik dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas dalam suatu negara atau sistem politik yang berkaitan dengan bagaimana tujuan bersama dirumuskan dan bagaimana cara tujuan itu dicapai melalui kebijakan, keputusan, serta tindakan-tindakan kolektif.²²

Secara teoritis, hubungan antara perempuan dan politik tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam pemilu atau jabatan legislatif (politik formal), tetapi mencakup seluruh proses di mana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan atau menyatakan sikap terhadap kebijakan yang berdampak pada kehidupan bersama. Politik, dalam pengertian luas, mencakup perjuangan atas kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan di ruang public,—dan keterlibatan perempuan di dalamnya mencerminkan upaya untuk mengoreksi ketimpangan



Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka 008), 11

historis yang selama ini meminggirkan suara perempuan. Maka penting bagi perempuan untuk memperjuangkan keterwakilannya dalam ruang-ruang politik.

Menurut **Anne Phillips** dalam bukunya *The Politics of Presence*, representasi atau keterwakilan politik perempuan tidak bisa hanya diwakilkan oleh laki-laki, karena pengalaman hidup perempuan bersifat khas dan membawa perspektif yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa kehadiran langsung perempuan dalam lembaga politik adalah ketentuan untuk mencapai demokrasi yang adil dan setara. Ia menulis:

...If the interests and perspectives of women are not represented in political institutions, then the resulting policies may be partial, even if those institutions claim to represent all²³

Politik perempuan tidak hanya merujuk pada keterlibatan perempuan dalam politik electoral dan jabatan publik, tetapi lebih luas mencakup perjuangan perempuan dalam menentukan arah kebijakan dan memperjuangkan kepentingan kaumnya di berbagai sektor kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya.

B. Kesadaran Gender

Konsep kesadaran gender mengacu pada cara pandang kritis terhadap struktur social (atau politik) yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara. Kesadaran ini tumbuh dari pengalaman dan refleksi atas ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Sandra Harding²⁴, sejarah tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan fakta objektif, tetapi juga sebagai hasil dari relasi kuasa yang membentuk struktur sosial. Oleh karena itu, pendekatan gender harus membongkar cara-cara di mana sistem patriarki mengukuhkan ketimpangan dalam politik, hukum, dan budaya.



²³ Anne Phillips, *The Politics of Presence* (Oxford: Oxford University Press, 4, accessed June 29, 2025, [chive.org/details/politicsofpresen0000phil](https://www.archive.org/details/politicsofpresen0000phil).
Sandra Harding, *Feminism and Methodology: Social Science Issues* (Bloomington: Indiana University Press, 1987), 9, accessed June 29, 2025, [chive.org/details/feminismmethodologyharding](https://www.archive.org/details/feminismmethodologyharding)

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sandra Harding dalam bukunya *Feminism and Methodology*²⁵ menyatakan bahwa pendekatan gender tidak cukup hanya mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang. Lebih dari itu, pendekatan ini harus mampu mengkritisi dan membongkar sistem pengetahuan serta struktur sosial yang selama ini dibangun di atas relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara. Bagi Harding, sejarah bukan sekadar rangkaian fakta netral, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang sarat dengan kekuasaan—termasuk kekuasaan yang menyingkirkan suara perempuan.

C. Partisipasi Politik Perempuan

Menurut UN Women Asia-Pasifik,

“Political accountability to women begins with increasing the number of women in decision-making positions, **but it cannot stop there**. What is required are gender-sensitive governance reforms that will make all elected officials more effective at promoting gender equality in public policy and ensuring their implementation.”²⁶

Partisipasi politik perempuan berarti keterlibatan perempuan secara aktif dalam berbagai agenda politik, baik di ruang formal seperti pemilu, parlemen, dan partai politik, maupun di ruang nonformal seperti gerakan sosial, organisasi masyarakat, dan advokasi kebijakan. Konsep ini mencakup bukan hanya hak untuk memilih dan dipilih, tetapi juga kemampuan perempuan untuk memengaruhi dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas.

1.7 Metode Penelitian

Dalam usaha perumusan dan menjawab pertanyaan yang muncul dari identifikasi/rumusan masalah, penulis menggunakan metode sejarah yang terdiri atas:

1.7.1 Pemilihan Topik

Pemilihan topik penelitian adalah tahapan pertama yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti sejarah. Pemilihan topik dapat berdampak pada



²⁵ Harding, ‘*Feminisme and Methodology*’, 9.

UN Women Asia and the Pacific, *Political Participation of Women*, 30 Juni 2025, <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-ernance/political-participation-of-women>.

keberlangsungan keseluruhan tahapan dalam metode sejarah. Biasanya, dalam penentuan topik penelitian, peneliti memilih topik berdasarkan kedekatan emosional maupun intelektual. Namun sering ditemukan, dalam pemilihan topik didahului dengan pengecekan soal ketersediaan bahan seperti dokumen arsip. Dalam penelitian ini, ide topik tentang Partai Wanita Rakyat, penulis temukan dari literatur yang berkaitan dengan sejarah pergerakan perempuan.

1.7.2 Heuristik/ Pelacakan Sumber

Pada tahapan ini, peneliti harus melacak keberadaan sumber yang sekiranya dapat dijadikan bukti sekaligus sumber data kesejarahan. Beberapa sumber yang selalu dicari biasanya berupa arsip dokumen sezaman, arsip foto, korespondensi, rekaman dan lainnya. “Tidak ada dokumen, tidak ada sejarah” adalah istilah yang membuktikan bahwa ketersediaan sumber primer adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan di saat melakukan tahapan metode penelitian sejarah. Sumber sekunder sebagai pendukung juga tak kalah pentingnya. Ada pun sumber primer yang sejauh ini telah dikumpulkan oleh penulis adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI 1945-1949. Reg. 1018 mengenai Wakil Setneg kepada Menteri Kehakiman tentang Partai Wanita Rakyat, Inventaris Arsip Tekstual Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri RI Tahun 1950-1959 Jilid II . No. Reg. 1016. Surat dari Pusat Pimpinan Partai Wanita Rakyat mengenai permintaan biaya Kongres ke I. 09 Agustus 1951 dan arsip foto oleh Kementrian Penerangan. Selain itu, telah dikumpulkan beberapa arsip surat kabar sezaman yang didapatkan melalui *Delpher.nl*. serta surat kabar *Kedaulatan Rakjat* yang termuat dalam koleksi Khastara Perpustakaan Nasional RI.

Adapun sumber sekunder yang menunjang penelitian penulis adalah karya berupa skripsi, buku, artikel ilmiah dan lainnya yang penulis peroleh baik dari koleksi pribadi penulis dan dosen pembimbing, perpustakaan FIB Unhas juga perpustakaan *online* seperti Ipusnas dan I-Jakarta.



Kritik Sumber/ Validasi

Setelah melacak dan mengumpul sumber sejarah, informasi sejarah tidak semata dicaplok menjadi data sejarah. Diperlukan adanya proses validasi

informasi sebelum diberi label “data”. Proses tersebut dinamakan kritik sumber. Kritik sumber terbagi atas kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ada untuk menguji keabsahan bahan sumber arsip serta informasi yang terdapat di dalamnya. Khususnya dalam penelitian seperti ini yang menggunakan kajian gender sebagai pendekatan selain daripada sejarah, teknik komparasi sumber dan data amat sangat penting dilakukan dalam tahap kritik sumber ini.

1.7.4. Interpretasi

Pada tahapan interpretasi atau penafsiran ini, hal yang harus dilakukan adalah menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis itu pun akan hadir dan menguraikan fakta-fakta, tafsiran bahkan kronologi kejadian. Interpretasi data dapat pula terbantu dengan adanya ilmu bantu atau pendekatan keilmuan yang lain.

1.7.5 Historiografi

Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Penulisan yang dimulai dengan Menyusun kerangka tulisan sesuai jenis tulisan yang dipilih, kemudian dilanjutkan dengan menulis dan menguraikan karya sejarah sebagai hasil dari metode sejarah ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1. Memuat latar belakang, tujuan dan manfaat, rumusan masalah, Batasan masalah, tinjauan pustaka juga metode serta sistematika penulisan.

Bab 2. Memuat informasi mengenai munculnya cikal bakal gerakan perempuan Indonesia sampai pada bagaimana gerakan perempuan Indonesia sampai sebelum dibentuknya Partai Wanita Rakyat.

Bab 3. Menjelaskan tentang pembentukan Partai Wanita Rakyat dan aktivitas politiknya selama masa revolusi kemerdekaan.



erisi gambaran tentang adanya perubahan orientasi Partai Wanita Rakyat engakuan kedaulatan dan dibubarkannya RIS. Dijelaskan aktivitas PWR ada surutnya gerakan PWR di 1959.

Bab 5. Berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian tulisan.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

SELAYANG PANDANG GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA

Usaha-usaha kesejahteraan yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah sebagian kecil dari usaha memakmurkan rakyat koloninya, selain dari upaya membudayakan pendidikan. Van Deventer adalah tokoh yang menaruh perhatiannya pada pelaksanaan Politik Etis di bidang pendidikan. Ia menganggap bahwa mengutamakan pendidikan bagi masyarakat pribumi, sama dengan memberikan ruang bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran.²⁷

Senjata ampuh untuk mencapai itu (pembangunan yang merupakan anugerah bagi masyarakat Indonesia) adalah pendidikan, dan banyak hal besar yang akan mengubah Jawa dalam seperempat abad... Diberikannya pendidikan kepada semua lapisan masyarakat harus diutamakan.. sesuai dengan perkembangan ekonomi Hindia Belanda.²⁸

Usaha menjalankan Politik Etis di bidang pendidikan pun dijalankan. J.H. Abendanon, dipilih menjadi kepala Departemen Pendidikan (1900-1905). Bersama dengan Snouck Hurgronje, Abendanon beranggapan bahwa pendidikan di Hindia Belanda perlu dibangun dan ditenahi menggunakan pendekatan elitis. Pendekatan elitis ini berbentuk pendidikan dengan memasukkan unsur Eropa, yaitu dengan menetapkan Bahasa Belanda sebagai pengantar. Harapannya adalah lahir lulusan yang berkiblat atau bahkan tunduk pada Belanda dari cara berpikir, bekerja dan terpenting dapat bekerja sama.²⁹

Pemikir pendidikan "etis" yang lain, tersebutlah Dirk Fock Menteri Urusan Daerah Jajahan (1905-1908) dan Gubernur Jenderal van Heutz (1904-1909) justru memiliki pandangan yang berbeda dengan Abendanon. Van Heutz melihat sasaran pendidikan yang tepat adalah rakyat golongan bawah, dengan pendekatan praktis dan bahasa daerah yang digunakan sebagai pengantar. Hal ini menurut van Heutz,



Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, 56.
Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, 57
M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Penerbit 2008), 339

dapat menghasilkan luaran yang dapat secara angung berpartisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi.

Sebelum memasuki tahun-tahun Politik Etis, memang sudah ada beberapa sekolah yang didirikan di Hindia Belanda. Mulai dari sekolah Kelas Satu (diperuntukkan untuk golongan atas), Sekolah Kelas Dua (untuk rakyat jelata). Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah modern seperti *Europeeische Lagere School*, setingkat sekolah dasar dan berbahasa Belanda. Di bawah pengaruh Abendanon, maka *Hoofden Scholen* dibentuk menjadi OSVIA (*Opleidingscholen voor indlansche ambtenaren*) atau sekolah pelatihan untuk para pejabat pribumi.³⁰ Tahun 1900-1902, sekolah ‘‘Dokter Jawa’’ direorganisasi dan menjadi STOVIA (*School Tot Opeiding Van Indladsche Artsen*) atau sekolah pendidikan dokter-dokter pribumi.³¹ Van Heutz menemukan ide tentang sekolah desa pada tahun 1906. Setahun setelahnya, sekolah-sekolah desa (*de Desasschool*) di Jawa pun dibuka. Meskipun kemudian harus melalui ‘‘perintah secara halus’’, akhirnya sekolah desa berdiri sebanyak 2.500 pada 1912. Namun, yang menjadi tantangan adalah, perjalanan sekolah desa ini yang harus berada dalam pusaran lingkungan masyarakat Jawa yang masih asing dengan pendidikan. Terlebih lagi, pemerintah harus menyediakan guru-guru yang telah tamat seolah Kelas Dua. Pada tahun 1914, sekolah Kelas Satu (untuk golongan atas) diperbaiki dan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan zamannya. Sekolah Kelas Satu ini diatur sedemikian rupa dan berubah menjadi HIS (*Hollandsche Inlandsche Schooll*). Sebagai pilihan sekolah untuk lanjutan HIS, didirikanlah pada tahun yang sama, MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Lanjut pada tahun 1919, didirikan sekolah menengah umum bernama AMS (*Algemeene Middlebare Scholen*). Untuk golongan menengah, tersedia sekolah untuk menjembatani ke tingkat perguruan tinggi bernama HBS (*Hoogere Burger School*).³² Pada tahun 1924, didirikan Sekolah Teknik *Technisch Hoogeschool* di Bandung dan Sekolah Hukum *ogeschool* di Batavia. Ke semua usaha pendidikan ini tak lain adalah demi



Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 339

Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 340

Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 343.

peningkatan kemakmuran dan kemajuan masyarakat Hindia Belanda, terkhusus Jawa. Sekolah lain yang menjadi penting untuk dikenal pada abad 20 ialah Perguruan Taman Siswa yang didirikan di Yogyakarta pada 1922 oleh RM. Suwardi Suryaningrat (selanjutnya dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara) dan sekolah-sekolah asuhan organisasi Muhammadiyah (yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan).

Politik Etis menganggap bahwa Hindia Belanda ini perlu ditingkatkan tarafnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.³³ Dan pendidikan adalah salah satu jalan yang harus ditempuh bagi masyarakat pribumi. Adapun pendidikan modern dengan kurikulum berbahasa Belanda adalah ciri dari politik etis itu sendiri. Pendidikan seperti ini dinilai nantinya mampu untuk memproduksi tenaga kerja dengan keahlian sesuai kebutuhan negara dan aktivitas ekonomi swasta yang dijalankan oleh Belanda. Tak hanya itu, pendidikan gaya barat dapat pula menjadi ruang transisi menuju modernitas penduduk pribumi di Hindia. Sebab dengan dasar Bahasa Belanda, dapatlah terbuka kemudian pintu-pintu informasi, khususnya dari dunia Barat, dunia modern. Tetapi kenyataan lain yang harus dihadapi adalah bahwa ini semua juga termasuk usaha agar bumiputera terpelajar ini bisa tunduk pada pemerintah kolonial.

Gerakan perempuan Indonesia adalah cermin dari pergolakan sosial, politik, dan budaya yang berlangsung sejak awal abad ke-20 hingga masa pasca-kemerdekaan. Perjalanan panjang ini menunjukkan transformasi besar dalam kesadaran, tujuan, dan strategi perjuangan perempuan. Dimulai dari perjuangan untuk memperoleh hak pendidikan dan menolak poligami di masa Kartini dan Dewi Sartika, gerakan perempuan bergerak ke arah nasionalisme dengan membentuk organisasi-organisasi kebangsaan pada masa pergerakan nasional. Pada masa pendudukan Jepang, ruang gerak perempuan menyempit namun tetap ada bentuk-bentuk perlawanan simbolik dan budaya. Usai kemerdekaan, perempuan tampil dalam perumusan kebijakan negara dan membentuk partai politik sendiri



Astuti, "*Sri Mangunsarkoro*", 34

seperti Partai Wanita Rakyat (PWR), sebagai bentuk kesadaran politik yang semakin progresif. Seiring perubahan zaman, isu-isu yang diangkat pun berkembang, dari emansipasi sosial ke tuntutan kesetaraan politik, perlindungan hukum, keadilan gender, hingga keterlibatan perempuan dalam pembangunan bangsa. Bab ini akan membahas dengan singkat dinamika transformasi gerakan perempuan Indonesia dan menunjukkan bagaimana perjuangan mereka senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika sejarah nasional.

2.1 Gerakan Perempuan Awal: Emansipasi dan Nasionalisme

Sistem kolonial dan program pendidikannya telah memungkinkan satu hal, yakni tumbuhnya kelas sosial baru, kelas menengah yang terdiri dari kaum intelektual/ cendekiawan di berbagai bidang. Oleh Belanda, mereka tetaplah dianggap sebagai *inlander*, tidak sama rata apalagi lebih tinggi dari orang-orang kulit putih. Namun satu yang pasti adalah kaum intelektual ini dalam keberjalannya akan membuka suatu zaman baru yang dikenal dengan *Zaman Pergerakan Nasional*. Zaman ini ditandai dengan munculnya kesadaran untuk mencari “kebangsaan”nya. Pada masa ini, intelektual bumi putra meramu dan menunjukkan kesadaran lewat platform politik yang baru. Mereka berpikir keras dan menggagas suatu ide dan perkumpulan yang memiliki cita-cita yang sama, yakni cita-cita memerdekakan bangsa yang belum memiliki nama resmi ini.³⁴ Bangsa yang kemudian dikenal dengan nama Republik Indonesia.

Dampak perubahan zaman dan tatanan pada masa politik etis, tidak hanya memunculkan kelas menengah yang mengarah pada terbukanya zaman yang baru, namun juga turut andil terhadap munculnya ide perjuangan emansipasi perempuan di Hindia Belanda ini. Jika berbicara tentang bidang edukasi politik etis, nama J.H Abendanon takkan luput untuk disebutkan. Dan Abendanon sampai kapan pun akan dihubungkan dengan seorang perempuan Jawa bernama Kartini, anak Bupati Jepara. Kartini lahir di pada 21 April 1879, tepat di tahun-tahun awal demokrasi. Terlahir sebagai keturunan bangsawan dengan gelar Raden Ajeng



Astuti, “*Sri Mangunsarkoro*”⁴¹

setidaknya memberikan *privilege* bagi Kartini untuk dapat menduduki bangku sekolah dasar dengan kurikulum Eropa, yaitu *ELS*. Sebagai jebolan *ELS* dengan bekal pengetahuan bahasa Belanda yang cukup baik, Kartini berangsur-angsur menaruh minatnya pada peradaban Barat, khususnya setelah ia membaca majalah feminis Belanda³⁵.

Pemikiran Kartini banyak dikutip lewat surat-suratnya yang menjadi saksi perhubungannya dengan perempuan “modern” dari negeri Belanda. Adalah Stella Zeehandelaar, seorang feminis sosialis Belanda yang terhubung dengan Kartini lewat aktivitas berkirim surat. Mengawali korespondensinya, Kartini memperkenalkan diri dan latar belakang keluarganya. Tak luput ia menggambarkan kondisinya sebagai perempuan Jawa yang menurutnya tidak leluasa menyambut dan mengakses meningkatnya taraf pendidikan.

Aku..anak perempuan kedua dari Bupati Jepara, dan aku mempunyai lima orang saudara laki-laki dan perempuan. Almarhum kakekku adalah Bupati di Jawa Tengah yang pertama membuka pintunya untuk tamu dari jauh seberang lautan--peradaban Barat. Semua anak-anaknya mempunyai kecintaan terhadap kemajuan yang diturunkan dari ayah mereka; dan mereka pada gilirannya memberikan kepada anak-anak mereka pendidikan yang sama yang dulu mereka nikmati. Kami anak-anak perempuan yang masih terbelenggu oleh adat-istiadat lama, hanya boleh memanfaatkan sedikit saja dari kemajuan di bidang pendidikan itu. Sebagai anak-anak perempuan, setiap hari pergi meninggalkan rumah untuk belajar di sekolah sudah merupakan pelanggaran besar terhadap adat negeri kami. Ketahuilah bahwa adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumahnya. Ketika berusia 12 tahun, aku harus tinggal di rumah, aku harus masuk “sangkan”. Aku dikurung di dalam rumah dan sangat terasing dari dunia luar, dan aku tidak boleh kembali ke dunia itu lagi selama belum berada di sisi seorang suami, seorang lelaki yang asing sama sekali, yang dipilihkan orang tua bagi kami untuk mengawini kami, yang sesungguhnya tanpa sepengetahuan kami.³⁶

Selain dengan Stella, Kartini juga bertukar surat dengan Nyonya Abendanon dan Nyonya van Kol (istri pendiri Partai Sosialis Belanda). Dalam aktivitasnya ini, Kartini secara tidak langsung telah bertukar informasi dan pengalaman dengan perempuan dengan latar belakang yang berbeda, tentu tantangan yang mereka hadapi juga sedikit berbeda. Sepanjang hidupnya, Kartini menyoroti banyak hal, di antaranya perlunya kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan. Kartini juga menaruh perhatian pada fenomena praktik poligami.



Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, 59
Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, 59

Menurutnya pula, kaum perempuan bahkan tidak bisa mengatakan apa yang menjadi keinginannya, termasuk untuk memilih sendiri calon suaminya. Mereka tidak bisa menolak perjodohan yang biasanya berujung pada poligami ini. Kaum perempuan dengan itu tentulah tersiksa, namun hal ini dianggap sebagai hal lazim saja, bukan sebagai bentuk pembatasan ruang gerak terhadap perempuan. Ketidaksadaran itu bisa terjadi sebab patriarki telah mendapat wadahnya dalam masyarakat Jawa. Patriarki mengkultuskan dominasi laki-laki dan meminggirkan perempuan ke ruang-ruang tanpa suara, tanpa gerak.

Kepada Profesor G.K Anton dan Nyonya dari Jena³⁷, Kartini mengirimkan suratnya yang bertanggal 4 Oktober 1902. Kartini menganggap kaum perempuan memiliki tugas moral sebagai ibu yang harus mendidik anak-anaknya, harus memastikan roda rumah tangga berjalan dengan baik. Dan dalam lanskap yang jauh lebih besar, kaum perempuan memegang peranan sebagai pendidik calon penerus bangsanya. Dengan tugas-tugas itu, menurutnya dibutuhkan pengajaran bagi gadis-gadis sebagai calon ibu. Kartini menuntut agar gadis-gadis difasilitasi dengan pendidikan /pengajaran.³⁸

Dengan dorongan Abendanon, Kartini membuka kelas kecil. Muridnya diajari membaca, menulis, membuat kerajinan tangan, berlatih memasak dan menjahit. Kartini yang yakin bahwa perempuan dapat menjadi pion membentuk moral anak bangsa dan menjadi penggerak emansipasi, memiliki cita-cita mulia yakni menjadi Guru di sekolah yang muridnya jauh lebih banyak dan menyentuh semua kalangan. Namun Kartini tetap saja perempuan Jawa yang tak punya banyak pilihan seperti yang ia gambarkan di surat pertamanya. Kartini harus menikah juga lewat jalur pilihan orang tua, dengan Bupati Rembang. Tak lama setelah melahirkan anak pertamanya, Kartini harus berpulang ke pangkuan Tuhannya.

Sepeninggalnya, Kartini dan segala buah pikirannya diabadikan lewat surat-suratnya yang dikumpulkan oleh Abendanon. Publikasi suratnya ini



Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia* 64.
Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, 65

oleh Abendanon diberi judul “*Door duisternis tot licht*” atau banyak dikenal dengan “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Kartini mungkin tidak menyangka bahwa pemikirannya itu dapat menyalakan api semangat bagi kaum muda Indonesia juga memantik gerakan feminis emansipatoris di Hindia Belanda. Atas inisiatif van Deventer dan istrinya pada 1912, Perhimpunan Belanda mendirikan sekolah-sekolah Kartini yang dinaungi oleh Kartinfonds.³⁹

Tokoh perempuan lain yang menaruh perhatian terhadap kondisi perempuan dan pendidikan adalah Dewi Sartika. Seorang perempuan Sunda yang lahir pada 1 Desember 1884. Mirisnya kondisi kaum perempuan memantiknya untuk menggagas aksi emansipasinya dengan mendirikan sekolah yang ia namai dengan *Keutamaan Isteri* pada 1904. Sampai pada 1912, Dewi Sartika tercatat telah mendirikan 9 sekolah.⁴⁰ Pada awal abad 20, fokus perhatian kaum perempuan terdidik adalah seputar bidang sosial. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa pendidikan adalah hal yang tak terelakkan lagi dibutuhkan bagi perempuan. Untuk melanjutkan cita-cita emansipasinya, Dewi Sartika mendirikan organisasi *Putri Mardika* pada 1912. Putri Mardika ini disokong oleh organisasi yang berdiri lebih awal yakni Budi Utomo (1908). Adapun organisasi Putri Mardika didirikan dengan tujuan untuk memberikan beasiswa bagi perempuan yang ingin bersekolah atau melanjutkan sekolahnya namun terkendala biaya.

Setelah Putri Mardika beroperasi, berangsur-angsur muncullah organisasi perempuan yang mayoritasnya masih bersifat kedaerahan. Di antaranya adalah *Kerajinan Amai Setia* (1914) di Surabaya, *Pawijatan Wanito* (1915) di Magelang, *PIKAT* (1917) di Manado, *Wanito Susilo* (1918) di Pemalang dan masih banyak lagi. Kemunculan perkumpulan perempuan ini adalah cerminan bahwa perempuan pribumi di Hindia Belanda perlahan telah meninggalkan sangkarnya. Baik mereka yang berasal dari kalangan atas maupun menengah, bertemu dalam wadah yang sama dengan cita-cita meningkatkan martabat dan taraf hidup perempuan.⁴¹



Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, 71
Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, 70
Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, 81

Organisasi-organisasi perempuan bergerak memberikan pelatihan keahlian yang diperlukan untuk berumah tangga, seperti memasak, menjahit, merawat anak dan lainnya. Adapun organisasi seperti Aisyiyah (1917) yang secara struktur adalah bagian wanita dari Muhammadiyah ini adalah potret gerakan perempuan muslim di Hindia Belanda. Anggota-anggota Aisyiyah pun mewakili kaum perempuan kelas menengah yang banyak di antaranya adalah keturunan bangsawan. Aisyiah ingin mengangkat derajat perempuan dan membekalinya dengan kesadaran dan pengetahuan dalam beragama Islam.

Kehadiran organisasi-organisasi perempuan awal ini bersamaan dengan munculnya pula organisasi kepemudaan. Pada masa itu berdiri Jong Java (1915), Jong Ambon, Jong Minasa dan Jong Celebes (1918), Jong Sumatera, serta Perhimpunan Indonesia di Bandung.⁴² Organisasi-organisasi pemuda tersebut pun mendirikan perkumpulan bagian wanitanya, di antaranya *Jong Java Meisyekring*, *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling*, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia dan lainnya. Kehadiran organisasi pemuda ini perlahan meningkatkan semangat persatuan di kalangan pemuda Indonesia. Mereka akhirnya bergabung dalam suatu organisasi yang bernama “Indonesia Muda” untuk pemuda, dan organisasi “Keputrian Indonesia” untuk kaum perempuan. Dengan perantara organisasi-organisasi itulah, para pemuda dan perempuan belajar berserikat dan mengorganisasikan diri dalam sebuah gerakan. Dari sinilah bermula suatu agenda penting yang dikenal dengan “Kongres Pemuda” yang diisi dengan “Sumpah Pemuda”.

Semangat agenda Kongres Pemuda ini tidak berhenti di kaum pemuda saja, melainkan kaum perempuan. Kaum perempuan menyusul pada tahun 1928, atas prakarsa Ny. Sukonto, Nyi Hadjar Dewantara, Ny. Sunaryati Sukemi dan Ny. Sujatin Kartowiyono, maka dilaksanakanlah Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22-26 Desember. Kongres ini dihadiri oleh beberapa perkumpulan di Mataram, Yogyakarta. Di antaranya adalah Wanita Taman Ssiwa,



Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, 87

Wanita Utomo, Aisiyah, Puteri Indonesia, *Jong Islamieten Bond* Bagian Wanita, Jong Java Bagian Wanita, dan Wanita Katholik. Maksud dari diselenggarakannya kongres ini tak lain adalah untuk membentuk suatu ikatan di antara perkumpulan-perkumpulan wanita yang ada di Indonesia. Dengan ikatan itu, supaya dapat didiskusikan hak, kewajiban, ataupun kebutuhan wanita Indonesia, ke arah yang berkemajuan.⁴³

Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 menunjukkan hal yang penting dari sekadar agenda pertemuan. Kongres ini adalah momentum konsolidasi gerakan perempuan Indonesia yang berskala nasional. Kongres ini merefleksikan bangkitnya kesadaran kaum perempuan tentang perlunya mengambil bagian dalam perjuangan kebangsaan. Keputusan untuk bertemu, berkumpul dan membentuk suatu “perikatan” adalah kesadaran akan kebutuhan untuk mempersamakan ideologi dan bergerak secara kolektif untuk memperbaiki kedudukan kaum Perempuan, juga ikut memperjuangkan kemerdekaan. Isu-isu yang dihadapi ini menarik, termasuk di antaranya kesadaran nasionalisme, Pendidikan Perempuan, perkawinan dini, adat, perceraian dan poligami.⁴⁴

Ada pun Kongres ini menghasikan keputusan, yakni didirikannya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), yang akan diketuai oleh RA. Sukonto. Beberapa keputusan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan *Studiefonds*, suatu badan pendanaan untuk membantu menanggung biaya pendidikan anak-anak perempuan yang tidak mampu.
2. Memperkuat kepanduan puteri.
3. Mencegah perkawinan di bawah umur.
4. Mengirim mosi kepada pemerintah yang di antaranya : meminta agar pemerintah memperbanyak lagi sekolah untuk anak perempuan, meminta pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang dapat menjamin janda dan



Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun* 142.
Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 19-21.

anak yatim pegawai negeri sipil, serta pemerintah harus memberikan sosialisasi terhadap anak perempuan calon pengantin terkait arti taklik nikah.⁴⁵

Setelah PPPI terbentuk, setahun kemudian, badan pemufakatan ini melaksanakan kongresnya. Kongres PPPI memutuskan mengganti badan pemufakatan ini dengan nama “Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia” atau (PPII). Kongres juga mengganti dan menetapkan AD/ART, menerbitkan Surat Kabar “Isteri” dan menamai *studifonds* PPII dengan “Seri Derma”.⁴⁶ Surat Kabar “Isteri” kemudian menjadi media yang cukup efektif dalam memperjuangkan cita-cita kebangsaan dan kemajuan perempuan yang digarap oleh PPPI. Lewat “Isteri” ini, kaum perempuan PPPI menyebarkan ide dan manifestonya. Surat Kabar “Isteri” diurus oleh anggota redaksi yang merangkap sebagai pengurus PPPI. Mereka di antaranya adalah Nyi Hadjar Dewantara, Ny. Sunaryati Sukemi, Ny. Ismuddin Saleh, Ny. Hajinah Mawardi, Ny. Ali Sstroamidjojo dan Ny. Badiah Gularso.⁴⁷ Seri Derma juga turut andil langsung untuk memberikan biaya pendidikan bagi anak perempuan yang membutuhkan, selain daripada juga mengusahakan pendidikan kepanduan putri.⁴⁸

PPII, semakin ingin menunjukkan identitas kebangsaan serta komitmennya untuk memajukan kaum perempuan. PPII pada tahun 1929 memutuskan bahwa Surat Kabar “Isteri” akan beroperasi dengan hanya menggunakan bahasa Indonesia, dan ini jelas politis. Tak hanya itu, PPII kemudian mengambil “kebangsaan” atau nasionalisme sebagai azas dari perkumpulan ini. Selain daripada itu, PPII mendeklarasikan diri sebagai bagian dari usaha Pergerakan Nasional. Disini pula muncul konsep “Perempuan Indonesia” yang berarti “Ibu Indonesia”. Bahwa bangsa dan negara nantinya akan bergantung pada kaum perempuan Indonesia sebagai “Ibu”nya. Untuk itu kaum perempuan harus merasa



⁴⁵Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 112. hlm 21-22.

Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 23.

G.A.Ohorella, Sri Suciatiningsih dan Muchtaruddin Ibrahim, *Peranan Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Direktorat Jenderal, 1992), hlm. 3

Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 23.

bahwa diri mereka berharga dan perempuan harus dihargai sebagaimana laki-laki dihargai di masyarakat. Konsep ini juga menekankan bahwa pergerakan perempuan pada periode ini berkelindan dengan pergerakan kebangsaan. Perempuan harus benar-benar mengabil andil dalam usaha pergerakan kebangsaan, yang tentunya sesuai dengan irama dan watak keibuannya/ keperempuannya.⁴⁹ Diskursus yang terbangun per tahun 1930, setelah Kongres PPII kedua di Surabaya, adalah potret “nasionalisme” dalam tubuh gerakan perempuan. Bergesernya fokus gerakan perempuan yang sebelumnya hanya bersifat kedaerahan menjadi berskala nasional. Hal itu bisa dilihat juga dari bentuk partisipasi anggota PPII di Kongres Perempuan se-Asia (*All Asian Womens Conference*) di Lahore. PPII mengutus N. Sunaryati dan Ny. Santoso.⁵⁰

Kaum perempuan Indonesia, khususnya PPII harus diperhadapkan dengan banyak sekali isu yang berhubungan dengan nasib perempuan. Dan dengan itu lembaga ini melakukan upaya-upayanya yang berupa :

1. Melarang praktik pergundikan, perkawinan dan perdagangan anak dan menuntut pemerintah kolonial untuk segera membuat undang-undangnya.
2. Penyelidikan terhadap kebersihan lingkungan di kampung-kampung serta penyebab kematian bayi-bayi.
3. Mempertahankan identitas kebangsaan dengan menjalin hubungan yang baik dengan perkumpulan di dalam dan luar negeri

Setelah Kongres kedua PPII, kaum perempuan semakin besar niatnya menghadirkan diri dalam urusan publik. Sepertinya kaum perempuan mulai menyadari bahwa sebaiknya perempuan tidak meletakkan jurang antara ruang privat dengan ruang publik. Perempuan pergerakan mulai saling mengarahkan untuk terjun dalam usaha pergerakan kemerdekaan bangsa.



Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 25.
Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 25.

Menjelang 1930an, pergerakan Perempuan agaknya sedikit bergeser. Kaum Perempuan yang mulanya berfokus pada isu domestik (privat) dan pendidikan, kali ini menaruh perhatian pada isu politik dan persatuan organisasi. Pada 1932, PPII melangsungkan Kongres di Solo. Selanjutnya diadakan lagi Kongres di Jakarta. PPII sebagai badan pemufakatan perempuan Indonesia, setidaknya telah 4 kali melaksanakan kongresnya. Dan sejauh keberjalanannya itu, PPII menaruh mengusahakan isu-isu penting, yakni :

1. Pencegahan perkawinan anak
2. Pendidikan anak khususnya anak perempuan yang tidak mampu
3. Kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan
4. Perlindungan wanita dan anak dalam perkawinan⁵¹.

PPII adalah gerakan kolektif kaum perempuan dengan cita-cita nasionalisme dan kebebasan perempuan. Adapun anggota-anggota atau perkumpulan perempuan yang tergabung dalam PPII ini, juga masing-masing bertumbuh dalam lingkup dan ruang yang lebih kecil namun tetap progresif. Sebut saja di antaranya adalah Wanita Taman Siswa. Sebagai bagian wanita dari Perguruan Taman Siswa, WTS memulai kiprahnya di Taman Siswa dan berfokus pada bidang pendidikan dan pengajaran. WTS yang dipimpin oleh Nyi Hadjar Dewantara juga sejak awal telah berkenalan dengan gerakan perempuan umum dalam Kongres Perempuan.

Sebelumnya, di tahun 1932, para pemerhati pendidikan termasuk lembaga dan organisasi seperti Perguruan Taman Siswa, Muhammadiyah dan PPII diperhadapkan dengan tantangan yang muncul dari tubuh Pemerintah Kolonial. Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Ordonansi Sekolah Liar di tahun ini juga. Ordonansi ini menyatakan pelarangan untuk sekolah dan perguruan “liar” yang tidak berada dalam *list* pemerintah. Istilah “sekolah liar” disematkan kepada sekolah dan perguruan yang tidak mengadopsi sistem dan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam menghadapi ordonansi ini,

1. Wanita Taman Siswa, menunjukkan andilnya sesuai dengan porsi annya. Saat guru-guru di “rumah”kan akibat ordonansi itu, WTS berusaha



Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 23.

agar pembelajaran tetap berjalan. Para anggota WTS sebisa mungkin menggantikan guru-guru tersebut untuk mengajar di depan kelas.⁵² Begitu halnya saat Perguruan Taman Siswa diberhentikan aktivitas belajar mengajarnya, para wanita WTS itu memilih alternatif dengan menadatang rumah murid-muridnya untuk mengajar langsung. Saat menghadapi pemerintah Hindia Belanda ini, perlawanan yang hadir tidak hanya dari kaum lelaki dan organisasi pemuda, melainkan juga perkumpulan wanita. Ini kembali menegaskan kehadiran perempuan dalam pergerakan kebangsaan. Selain Nyi Hadjar Dewantara, tokoh perempuan lain yang kelak akan memimpin dan memberi pengaruh terhadap keberjalanan WTS adalah Sulandari atau akrab disebut dengan Ny. Sri Mangunsarkoro. Pada tahun 1937, Sri Mangunsarkoro menulis dalam Madjalah Keluarga, tentang ‘‘Persamaan hak antara kaum putri dan lelaki dalam Taman Siswa.’’⁵³

Pada 1935, sebagai Keputusan Kongres Perempuan Indonesia ke II di Jakarta, diputuskan dibentuk badan kongres ‘‘Kongres Perempuan Indonesia’’. Dengan itu juga, tepatnya di Konferensi PPII 1935 di Mataram, diperjelas bahwa bahwa PPII bubar Bersama dengan didirikannya badan ‘‘Kongres Perempuan Indonesia’’.⁵⁴ Kongres akan mengusahakan dan menyelidiki beberapa hal, seperti pemberantasan buta huruf, perkawinan dalam hukum Islam, konsep ‘‘Ibu Bangsa’’, kedudukan perempuan dalam hukum Islam, juga perburuhan perempuan.⁵⁵

Sampai tahun 1938, kiprah dan aktivitas gerakan perempuan di Indonesia dapat dikatakan mengalami peningkatan pencapaian, terutama di bidang pendidikan, kedudukan sosial dan politik. Di tahun ini, perempuan Indonesia telah menghadirkan diri dalam kontestasi politik skala kecil, yakni dalam pemilihan anggota Dewan Kotapraja. Tuntutan hak pilih dan dipilih untuk kaum perempuan yang dihasilkan dalam Kongres PPII di Surabaya, dirasa telah bersambut. 4 orang perempuan Indonesia akhirnya terpilih sebagai Dewan Kota. Mereka di antaranya



Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 26.
Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*,. 47
Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 30
Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 29-30

Nn. Sri Umiyati (Cirebon), Ny. Siti Sundari Sudirman (Surabaya), Ny. Emma Puradiredja (Bandung) dan Ny. Sunaryo Mangunspuspito (Semarang).⁵⁶ Isu-isu yang banyak mendapat perhatian dari kaum Perempuan khususnya badan Kongres, yakni seputar kedudukan perempuan dalam perkawinan, nasib buruh Perempuan, tuntutan hak pilih dan memilih, Pendidikan, dan masih banyak lagi.⁵⁷

Pada tahun 1939, berdiri suatu organisasi yang bernama “Gabungan Politik Indonesia (GAPI)”. Organisasi yang diinisiasi oleh Parindra ini adalah bentuk kerja sama partai-partai politik dan organisasi pergerakan yang bersandar pada “Persatuan Nasional”, persatuan aksi dan gerakan, serta *keinginan untuk menentukan nasib sendiri*”. GAPI yang dipimpin oleh M.H Tamrin ini, menuntut Indonesia Berparlemen. GAPI menuntut Indonesia untuk berparlemen namun menolak ordonansi wajib militer untuk bangsa Indonesia. Aksi GAPI ini lalu direspon oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan membentuk Komisi Visman yang bertugas untuk menyelidiki keinginan dan tuntutan bangsa Indonesia terkait adanya perubahan tatanan negara.

Menuju akhir masa pemerintahan Hindia Belanda, kaum perempuan menunjukkan potret yang lebih berani dan atraktif. Pada Kongres Perempuan Indonesia 1941 di Surabaya, diputuskan beberapa hal, di antaranya :

- 1) Kongres Perempuan Indonesia selanjutnya akan diselenggarakan di Surabaya dengan sebagai pimpinan adalah Ny. *Sumadi* dari Putri Budi Sedjati Surabaya.
- 2) Agar anggota *Volksraad* mengusulkan Bahasa Indonesia untuk dimasukkan dan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dan tetap untuk sekolah tingkat menengah (H.B.S dan A.M.S)
- 3) Kongres menyetujui aksi GAPI yang menuntut Indonesia berparlemen dan menolak ordonansi wajib militer. Dengan itu Kongres mengimbau kepada anggotanya untuk mendukung aksi GAPI tersebut.



Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 28.
Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 31-33.

- 4) Kongres mengirim mosi kepada Pemerintah bahwa Perempuan Indonesia harus diberi hak untuk dapat memilih anggota Dewan Kota dan Dewan Rakyat dari golongan Indonesia.⁵⁸
- 5) Kongres menginginkan agar anggota *Volksraad* mengusulkan Bahasa Indonesia untuk dimasukkan dan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dan tetap untuk sekolah tingkat menengah.

Di tahun itu juga, Komisi Visman mengundang 2 perempuan Indonesia untuk menyampaikan pandangannya. Ny. Sukaptinah S.Mangunpuspito menyampaikan tuntutan berupa “Indonesia Berparlemen”. Hal yang mengejutkan berasal dari Ny. Sri Mangunsarkoro, ia menginginkan “Indonesia Merdeka”.⁵⁹

2.1.1 Sri Mangunsarkoro dan Konsep “Ibu Bangsa”

Salah satu anak perempuan yang lahir di masa Politik Etis dan berkesempatan menempuh sekolah di zaman itu, ialah Sulandari yang lahir di Madiun pada 16 Mei 1905. Sulandari adalah satu dari segelintir anak perempuan yang pada masa itu bisa menempuh pendidikan. Tentu saja karena ia berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah. Ayahnya S.Wirjodidjojo adalah seorang Mentri Kredit Bank Pemerintah Hindia Belanda di Wallikukun dan Ngawi, wilayah Madiun⁶⁰. Ia bisa bersekolah dan mempelajari ilmu pengetahuan umum, ilmu yang dipelajari laki-laki. Perkenalannya dengan pendidikan formal, bermula di HIS yang ia tamatkan pada tahun 1919. Tamat dari HIS, ia melanjutkan pendidikannya di sekolah guru perempuan *Gouvernements Meisjkweek School* di Salatiga dan tamat pada 1924. *Gouvernements Meisjeskweek' School*, atau sekolah guru perempuan satu-satunya di seluruh Hindia Belanda. Murid-muridnya datang dari seluruh penjuru nusantara dengan latar belakang, keluarga, adat istiadat dan pengalaman yang berbeda. Di sinilah Sulandari berinteraksi dan mengenal kebudayaan yang ada



Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 23.
 Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia* 29
Mengenal Taman Wijaya Brata: Makam Pahlawan Pejuang Bangsa
 rta : Majelis Luhur Taman Siswa, 1996), hlm. 131

di setiap daerah kawan-kawannya. Di sini, transfer ilmu Eropa sudah dilakukan secara tidak langsung. Karena pengajar sekolah ini adalah guru-guru perempuan dari Belanda.. Disini dapat dilihat perbandingan ruang gerak perempuan pribumi dan Eropa yang begitu berbeda. Di sekolah ini, hampir seluruh pengajar adalah guru-guru perempuan yang didatangkan dari Belanda. Di sekolah ini, ia mengenal keragaman cerita dan pengalaman teman-teman perempuannya yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dalam kesehariannya, Sulandari perlahan mengenal perbedaan ruang gerak antara perempuan Eropa dibandingkan dengan perempuan bumiputera.

Pada 1924, Sulandari mengasah ilmu yang didapatnya di sekolah guru, dengan bergabung menjadi pengajar di Taman Siswa Tegal. Pendiri Taman Siswa berfikir bahwa perlu dibangun suatu sistem pendidikan yang bersandar pada sifat dan kearifan pribumi. Dengan berlandaskan pada kebudayaan Jawa, sekolah ini berjalan di luar garis pemerintah kolonial dan tidak mengikuti kurikulum pemerintah kolonial. Perguruan Taman Siswa pada 1932, berhasil mendirikan 166 sekolah dengan murid sekitar 11.000.⁶¹

Taman Siswa sendiri sebagai perguruan, bercita-cita menghapuskan perbedaan derajat dan stratifikasi sosial manusia atas dasar warisan feodalisme. Kata ‘‘Perguruan’’ yang dipilih, bukan ‘‘sekolah’’, mengandung arti bahwa di Taman Siswa adalah tempat tinggal sekaligus tempat para guru mendidik muridnya dan bertanggung jawab atasnya. Perguruan ini memiliki konsep kekeluargaan dengan penghormatan terhadap sesama manusia (kesetaraan) adalah hal yang utama dari sistem ini.⁶² Oleh karena itu, di Taman Siswa sapaan seperti Raden Mas, Raden Ayu dan sejenisnya, tidaklah digunakan. Ki Hadjar Dewantara yang sebenarnya bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, pun mengganti nama dan sapaannya semenjak mendirikan Taman Siswa. ‘‘Ki’’



Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 380-381.
Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*, 92-93.

diberikan untuk pengajar laki-laki, Nyi atau Ni untuk sebutan guru perempuan.⁶³ Taman Siswa memperkenalkannya terhadap ide “persamaan manusia” bahwa posisi manusia tidak ditentukan dari garis keturunan ataupun gelar kebangsawanan. Betapa warisan feodal, juga memang ingin dientaskan di Perguruan Taman Siswa.

Setahun mengajar di Taman Siswa Tegal, Sulandari pindah ke Yogyakarta dan mengajar di Taman Siswa Yogyakarta. Karena Yogyakarta adalah pusat lembaga perguruan ini, maka di sana tentu saja ia bertemu dan berkenalan dengan Ki dan Nyi Hadjar Dewantara. Mereka lah pemegang tonggak pendidikan di Taman Siswa, bahkan dijuluki sekarang ini sebagai Bapak pendidikan nasional. Tak hanya itu, keaktifannya sebagai pengajar di Taman Siswa mempertemukannya dengan tokoh pergerakan sekaligus ketua Taman Siswa Cabang Jakarta, Sarmidi Mangunsarkoro. Ni Sulandari dan Ki Sarmidi Mangunsarkoro pun menikah pada 1929. Ia (selanjutnya disebut Sri Mangunsarkoro) lalu ikut suaminya ke Jakarta, dan melanjutkan tugas mengajarnya di Taman Siswa Jakarta. Di Jakarta, selain daripada mengajar, Sri Mangunsarkoro juga bertugas sebagai kepala asrama para murid Taman Siswa.⁶⁴

Tak hanya itu, ia juga berkenalan dengan perkumpulan perempuan pengajar dan istri-istri pengajar di Taman Siswa, yaitu “Wanita Taman Siswa” yang dipimpin oleh Nyi Hadjar Dewantara. Wanita Taman Siswa bertujuan untuk mengusahakan agar perempuan Indonesia bisa mendapat posisi yang penting dan menentukan di masyarakat. Perempuan pada masa itu dan masa sebelumnya, sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan atau bersekolah. Anak perempuan golongan atas terbentur oleh adat feodal yang patriarkis dan membatasi ruang gerak perempuan untuk memperoleh haknya untuk memperoleh pendidikan. Untuk anak perempuan golongan rakyat jelata, benturannya bertambah, yaitu ekonomi, tanggung jawab dan beban kerja domestik. Apalagi masyarakat belum



Astuti, “*Sri Mangunsarkoro*”, 58.
Astuti, “*Sri Mangunsarkoro*”, 61.

banyak yang mengerti bahwa pendidikan adalah hak, ia penting dan berpotensi membawa pada kemajuan.

a. Perempuan Sebagai Ibu Bangsa

Berikut ini adalah artikel dalam majalah Poesara yang ditulis oleh Wanita Taman Siswa Jakarta "Dimanakah Letak Perempuan dalam Rumah Tangga atau Masyarakat".

...masyarakat adalah pergaulan hidup yang terdiri dari atas beberapa rumah tangga. Demikian kita dapat mengetahui bahwa masing-masing rumah tangga adaah sebagian kecil dari masyarakat... maka tak dapatlah kita memberi batas antara rumah tangga dan masyarakat. Semua soal masyarakat seperti ekonomi, politik, kesehatan, keagamaan, pengetahuan, pendek kata semua keperluan manusia di atas dunia ini, terdapatlah juga dalam masing-masing rumah tangga, walaupun semua, walaupun dinyatakan dengan serba kecil.. maka teranglah bagi kami, bahwa antara masyarakat dan rumah tangga tentu ada saing pengaruh. Kebajikan kejelekan dalam rumah tangga dirasai juga oleh masyarakat. Dan kejelekan dan kebaikan masyarakat terasa pula dalam rumah tangga.⁶⁵

...terdapatkah dalam rumah tangga soal politik, jika soal masyarakat betul-betul menjadi soal rumah tangga ? Jawaban kami: terdapat juga.. menurut faham kami boleh dikatakan bahwa politik itu, sebagai sistem penjagaan negeri, berarti juga penjagaan keluarga dalam arti yang luas.

...terdapatkah dalam keluarga perekonomian ? Jawaban: "ada pula". Bukanah maksud perekonomian itu juga penjagaan kesejahteraan dalam keluarga, supaya keluarga dapat hidup teratur dan kuat".⁶⁶

...persamaan hak antara perempuan dan laki-laki pada masa sekarang ini, baik oleh kebanyakan kaum ibu sendiri, maupun oleh pihak kaum bapak masih diterima dengan tak kesenangan hati. "bagaimana kita kaum ibu mesti sama dalam segala-gaanya dengan kaum bapak. Kodrat kita tetap berlainan dengan kaum bapak". Katanya penerimaan tak senang atau tak setuju tadi ada salahnya, tetapi ada juga benarnya juga. Juga, barang persamaan antara perempuan dengan laki-laki itu biasanya diterima sebagai : "kaum ibu yang hendak merdeka semerdeka-merdekanya dan meniru segala tingkah laku laki-laki dengan meninggalkan kewajibannya".

...jika pada sekarang masih tampak, bahwa kaum perempuan kita belum dapat mempergunakan kemerdekaan dan kemajuan dengan semestinya, itulah yang biasa. Boelh saja umpamakan bahwa kaum ibu umumnya masih kebingungan, tidak tahu, bagaimana harus memakai kemerdekaan itu. Boleh jadi kaum ibu Indonesia dengan pengagapan umum sangat mengikat kita. Ratusan tahun kita hidup dalam keadaan demikian, baru sekaranglah kita dapat kesempatan untuk menjaanka rasa kemanusiaan kita dengan leluasa".

...kita harus ingat pada pokok hidup kita yang asli. Menurut pokok-pokoknya hidup, apakah hak antara perempuan dan laki-laki bukan bersamaan semata-mata? Jika sekarang dalam praktik hak perempuan yang sama dengan kaum bapak itu tidak jalan, itulah sesuatu yang nyata, bahwa kita kaum ibu ini melalaikan kewajiban kita sebagai manusia. Jika



Astuti, "Sri Mangunsarkoro", 76
Astuti, "Sri Mangunsarkoro", 76.

tak demikian, hak kita tentu tak terdesak oleh kaum bapak. Kita tak memelihara hak dan kekuatan kita sebagaimana mestinya ... dalam dunia Taman Siswa pada kaum ibu ada kesempatan yang seluas-luasnya, sama uasnya dengan kaum bapak untuk bertumbuh menurut kodrat masing-masing. Persamaan hak dari kaum ibu ini tidak satu teori lagi atau satu ide yang harus kita kejar, melainkan ada suatu kenyataan yang tercipta dalam azas peraturan Taman Siswa yang menyafkan kaum melaraskan diri kita pada keadaan itu.⁶⁷

Di lingkungan Perguruan Taman Siswa, selain mengajar, Sri Mangunsarkoro juga banyak belajar. Ia belajar dari pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang dan kondisi. Ia memikirkan bagaimana seharusnya perempuan mengambil posisi dalam keluarga atau rumah tangga, masyarakat atau bahkan negara. Disini ia mengenal arti tentang konsep “perempuan sebagai pendidik”. Perempuan harus mampu untuk mendidik anak-anak, calon penerus bangsa.

... perempuan yang dalam rumah tangganya hendak sejajar dengan laki-laki, supaya dapat melakukan kewajibannya, dengan semestinya, perempuan itu juga harus turut memperhatikan segala kejadian di luar rumah tangganya, seperti masalah ekonomi, politik dan sosial itu. Maka Wanita Taman Siswa, sebagai ibu, dalam keluarga Taman Siswa harus mempelajari dan jika perlu melakukan juga pergerakan yang berhubungan dengan ekonomi, politik dan sosial itu.

Sebab, kita sebagai ibu Indonesia, berkewajiban turut menuntut kemerdekaan tanah air dan bangsa. Apalagi pendidikan Taman Siswa itu seolah-olah juga dilakukan untuk mencapai cita-cita kebangsaan tadi. Anak-anak murid kita di kemudian hari harus tahu kepada kedudukannya, sebagai putra dan putri Indonesia.⁶⁸

... buat kami, rumah tangga dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tempat rumah tangga adalah di dalam lingkungan masyarakat.

Maka antara keadaan rumah tangga dan masyarakat bangsa kita tentu ada saling pengaruhnya. Sebab-sebab dari kesalahan kehidupan dalam masyarakat bangsa tidak dapat hanyalah dicari dalam kejadian-kejadian masyarakat sahaja. Kejadian-kejadian dalam rumah tangga harus diselidiki.

Janganlah pergerakan itu menghilangkan dasar kodrat perempuan Indonesia, malah pergerakan itu harus berdaya upaya kuatnya, untuk mengukuhkan dasar kodrat itu. Janganlah kita sekali-kali jatuh dalam kefatiran.

... Daya upaya untuk meninggikan derajat rumah tangga, harus ditujukan juga kepada ketinggian derajat masyarakat bangsa kita. Sebaliknya, daya upaya untuk meninggikan derajat masyarakat bangsa sekali tidak boleh melupakan pentingnya ketinggian derajat rumah tangga.

Tandanya:

Jika derajat rumah tangga di seluruh dunia ini tinggi, dunia akan aman adanya. Bagaimanakah keadaan dunia saat ini? Sebaliknya. Semua bangsa sibuk mencari jalan untuk membereskan keadaan masyarakat bangsanya? Apakah hasilnya? Keadaan dunia



Astuti, “*Sri Mangunsarkoro*”, 78.

Astuti, “*Sri Mangunsarkoro*”, 72.

maahan makin gelap gulita, geledak pepereangan muai gemuruh lagi. Manusia lupa pada asalnya. Bahagialah mereka yang masih ingat pada kemanusiaannya, yang seperti bunga api saja sampai serak keronggongannya dari berteriak-teriaknya, untuk mengingatkan sesama manusianya kepad asall kehidupan.⁶⁹

Melihat konteks zaman yang masih dalam kolonialisme tidaklah aneh jika kaum Perempuan terdidik perempuan berpikir bahwa perempuan juga harus ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan. Perempuan harus ditumbuhkan nasionalisme dalam jiwanya.

Sri Mangunsarkoro juga melihat bahwa kaum perempuan berkewajiban menentukan nasibnya sendiri, juga nasib bangsanya. Untuk bisa mendidik calon penerus bangsa, maka perempuan harus terdidik, harus mengenal ilmu pengetahuan. Konsep itu kemudin dikenal dengan konsep ‘Perempuan sebagai Ibu Bangsa, Ibu masyarakat’.

Arti Perempuan Sebagai Ibu Bangsa

Oleh: Ny. Sri Mangunsarkoro (Wanita Taman Siswa)

1. Tiap-tiap manusia sebagai makhluk mempunyai kewajiban yang kodrat, yaitu mempertahankan jenisnya. Dalam praktik ini, berarti bahwa tiap-tiap manusia berkewajiban mempertahankan turunannya.
2. Dalam kewajiban mempertahankan turunan itu, pekerjaan perempuan dan laki-laki dalam pokoknya berbeda. Pekerjaan perempuan ialah *memelihara* turunan, pekerjaan laki-laki *menjaga* turunan.
3. Dalam sikap perempuan terhadap pada turunan itulah letaknya kepentingan arti perempuan sebagai ‘Ibu Bangsa’. Sebagai Ibu Bangsa, perempuan Indonesia berkewajiban yang luhur, ialah menimbulkan Bangsa yang baru, yang teguh dan kuat, lahir dan batin.
4. Pengaruh perempuan pada barang yang mengelilinginya besar sekali, baik via suaminya atau dengan langsung. Dengan tambahnya keluhuran budi dan kesadaran perempuan, pengaruh itu baiknya akan berlipat ganda.
5. Ada dua macam kemiskinan orang yang harus diberantas, *kemiskinan duniawi dan kemiskinan jiwa*. Menimbulkan *budi pekerti yang luhur* dalam golongan dua macam orang miskin itu berarti besar untuk kebaikan masyarakatnya.
6. Di Indonesia, kewajiban ‘Ibu Bangsa’ yang terpenting pada dewasa ini ialah membesarkan jumlah putra dan putri Indonesia ini. Putra dan putri Indonesia itulah yang harus menjadi tuang belakang Bangsa Indonesia yang baru⁷⁰

Berbicara tentang perempuan sebagai ‘Ibu Bangsa’, maka ibu bangsa wajib tidak hanya memikirkan soal diri sendiri, keluarga dan urusan domestiknya,



Astuti, ‘Sri Mangunsarkoro’, 74.

Astuti, ‘Sri Mangunsarkoro’, lampiran.

namun harus pula menaruh perhatian terhadap perjuangan kebangsaan. Perempuan harus lebih peka terhadap problema bangsanya.

.... Menjadi ibu Indonesia bukan berarti menjadi perhiasan rumah atau huisloof, melainkan menjadi ibu dari segenap anak Indonesia. Apakah arti ibu? Ibu yaitu pendidik yang nomor satu dari anaknya. Pendidik yang setia, serta ridha dan ikhlas menanggung segala kesusahan dan penghidupan, kalau saja anaknya yang dididik itu menjadi orang yang diangan-angannya, ... kita harus mendidik anak kita, agar supaya mereka tahu akan maksudnya hidupnya tahu akan kewajiban terhadap tanah airnya.. pemeliharaan desa dan kampung harus kita masukkan dalam daftar pekerjaan kita. Dirikanlah di tiap-tiap desa dan kampung sekolah yang berdasar kebangsaan. Oleh karena rasa kebangsaan lah, maka rakyat-rakyat yang mundur, lekas bisa mencapai kesopnanan, kebesaran dan kekuasaan... sungguh masih uas sekali pekerjaan kita, dari itu saja minta supaya dalam kongresnya, PPII, memberi pembagian pekerjaan yang sempurna, agar supaya kita tidak bekerja in de wilde weg, kata orang Belanda.⁷¹

Tugas mendidik penerus bangsa diletakkan kepada perempuan yang dianggap mampu diembannya. Dalam hal ini, perempuan dianggap sosok yang dapat mempengaruhi keberjalanan dan masa depan suatu bangsa, asalkan ia ingin maju dan berkomitmen untuk mendidik dirinya sendiri dan mendidik anak-anak bangsa. Di kemudian hari dikenal istilah "Perempuan Sebagai Ibu Bangsa, Ibu Masyarakat". Hal yang tak kalah penting untuk memperjuangkan Indonesia Baru itu adalah pendidikan, yang dalam konteks ini "pendidikan kebangsaan" dan pendidikan perempuan.

Pada tahun 1930, Sri Mangunsarkoro berpartisipasi dalam suatu badan "Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak". Dalam rapat P4A, beliau menyampaikan pandangannya lewat pidato yg berjudul "Perlindungan Pemerintah Terhadap Keadaban Kaum Perempuan".

.... Banyak sekali kaum perempuan datang dari desa ke kota untuk mencari penghidupan, karena di desanya masing-masing perekonomian sudah rusak. Mereka terpaksa bekerja di dalam perusahaan yang umumnya tak mementingkan peri keadaban kita, atau datang di tangsi-tangsi atau di kamp mereka itu lalu dipergunakan oleh mereka yang sama sekali tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu, atau mereka yang katanya telah mempunyai keadaban baru untuk memuaskan nafsunya dan kesudahannya mereka pun jatuh di gelombang kenistaan.

Tidak saja mereka dapat menjual badannya sendiri, tetapi banyak lagi dari mereka yang dijual oleh orang-orang yang menginjak kebudayaan timur. Mereka yang beradaban baru ng mempunyai uang lalu membeli, sehingga perdagangan lalu merajalela.⁷²



Astuti, "Sri Mangunsarkoro", 85.
Menenal Taman Wijaya Brata, 81.

Pada 1930, Krisis ekonomi melanda negara-negara industri di benua Eropa dan Amerika Utara. Harga-harga komoditi ekspor menurun dengan tajam, komoditi andalan seperti gula dan kopi tidak lagi menguasai pasar global. Adapun tanaman seperti karet, kopra dan lainnya, juga ikut merosot dari segi luas lahan dan skala produksi. Semua itu beruntut dan memberikan *impact* langsung ke Hindia Belanda. Dalam majalah Isteri, digambarkan kondisi-kondisi perempuan akibat depresi ekonomi tersebut. Banyaknya pekerja perkebunan yang akhirnya harus kembali ke desa-desa untuk bertahan hidup, malah menemui kondisi yang tidak lebih baik. Jumlah pekerjaan yang sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang butuh hidup dengan bekerja. Pengangguran melonjak angkanya, perempuan-perempuan pun kebanyakan pindah ke kota untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka yang bekerja sebagai PRT di kota, awalnya boleh bernafas lega sebab mendapat gaji yang sepertinya cukup baik, namun beresiko. Perempuan pekerja itu kerap kali mendapatkan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tuan rumah tempatnya bekerja. Terlebih lagi, tidak ada regulasi atau ordonansi yang bisa melindungi perempuan dari kejahatan seperti itu.

Ada pun para perempuan yang memilih bekerja di daerahnya, seperti di perkebunan. Nasib mereka tidak jauh lebih menyenangkan. Mereka yang tentu saja diupah hanya dengan 10 sen sehari, harus bekerja dengan sangat keras sehari. Upah tersebut tidak cukup bahkan untuk makan keluarga dan membeli sandang. Makanya banyak dari mereka yang tubuhnya tidak tertutupi pakaian/ kain, karena tidak mampu membeli. Tidak sampai disitu, banyak perempuan desa yang saat sdi perkotaan, tidak tahu menahu tentang seluk beluk hidup di kota, kena tipu dan harus menjadi pekerja seks.

Perpindahan penduduk yang marak ke areal industri perkebunan, pada saat depresi ekonomi justru mengalami “arus balik”. Perlahan para pekerja kembali ke kampungnya sebab lapangan pekerjaan sebagai buruh perkebunan tidak lagi
satisfying hidup. Aktivitas impor menurun seiring dengan merosotnya nilai



ekspor. Ke semua hal ini, pada titik tertentu terpaksa harus memecat dan memulangkan pegawai-pegawai berkebangsaan Eropa. Dengan ini, angin segar sedikit muncul, sebab perlahan pekerjaan pegawai Eropa ini digeser oleh orang2 pribumi. Alasannya satu, karena pegawai pribumi bayarannya rendah, sesuai dengan kebutuhan zaman itu.⁷³

Dalam tugas dan aktivitasnya di Taman Siswa dan Wanita Taman Siswa, Sri Mangunsarko sekaligus menggunakan kesempatan itu untuk belajar mengenai kekhususan apa saja yang ada pada pelajar perempuan, bagaimana metode pengajaran yang tepat, serta membantu memperkenalkan nilai-nilai persamaan antara manusia perempuan dan laki-laki kepada para murid sedini mungkin. Sekolah yang didirikan sebelum dan setelah politik etis dijalankan, kebanyakan memisahkan murid berdasarkan gender, seperti sekolah Sri Mangunsarkoro dahulu. Tibalah ia berfikir pada suatu metode pendidikan/ pengajaran yang sama sekali berbeda. Metode itu dikenal dengan *Co-educatie* atau metode pendidikan bersama-sama. Konsep pendidikan *Co-educatie* yaitu tidak dipisahkan ruang belajar antara siswa perempuan dan laki-laki agak terjalin interaksi yang akan saling mempengaruhi pikiran dan cara pandang. Yang di kemudian hari dapat menjadi bekal untuk perempuan dapat mengakses ruang yang sama. Sebelum itu, menurutnya metode pendidikan itu harus dibagi 2 sesuai sasarannya, yakni :

1. Metode pendidikan untuk anak-anak. Kategori anak-anak ini berkisar pada usia di bawah 6 tahun dan di atas 6 tahun. Di usia kanak-kanak (di bawah 6 tahun), pengajaran yang tepat adalah melatih ketajaman inderawi agar dapat memberikan stimulasi yang baik untuk emosi dan kognisi. Setelah usia 6 tahun ke atas, maka waktunya untuk memberikan pengetahuan dasar seperti baca, tulis, hitung, dan lainnya.
2. Metode pendidikan untuk anak yang telah beranjak dewasa, baik laki-laki juga perempuan. Pada usia ini, murid-murid sudah meningkat kepekaannya dan lebih berfikir, karakternya juga semakin terlihat. Penting untuk melihat pola



Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 400-401.

perilaku dan sifat yang berbeda antara murid laki-laki dan perempuan. Meskipun begitu, letak keutamaan ko-edukasi adalah agar pengetahuan yang diajarkan kepada para murid tidak terdapat perbedaan apalagi kesenjangan berdasarkan jenis kelamin.⁷⁴

Adapun pendidikan, menurutnya harus diberikan ke dalam dua kategori, yaitu pendidikan kebangsaan dan pendidikan perempuan. Semua itu tidak lain lahir dari pertimbangan agar perempuan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang sama seperti laki-laki agar dapat ikut andil dalam ruang yang lebih besar dan menentukan, di masyarakat salah satunya.

Kian hari, semakin aktif Sri Mangunsarkoro dalam Wanita Taman Siswa. Setelah menjadi Ketua Wanita Taman Siswa di Jakarta pada 1930, Sri Mangunsarkoro semakin gencar menyebarkan pemahaman akan pentingnya peran yang bisa diambil oleh perempuan di masyarakat, bukan hanya di ruang domestik. Ia ingin pemahaman itu tumbuh berkembang dengan baik di lingkungan Perguruan Taman Siswa. Bersama dengan anggota-anggota Wanita Taman Siswa yang lain, Sri Mangunsarkoro memprakarsai diadakannya konferensi di Jawa Tengah pada 1 Maret 1931 di Gedung Wismo Rini. Sri Mangunsarkoro berpidato, ia mengajak agar guru laki-laki bersedia bekerja sama dengan guru perempuan :

...dengan pekerjaan pemeliharaan pelita kebangsaan oleh Wanita Taman Siswa bersama-sama dengan saudara saudara kita guru laki-laki dapatlah kita dengan sepenuh-penuhnya memberikan hawa yang murni (zuurstcf) kepada pelita kebangsaan kita. Pelita yang pada permulaan hanya bisa kelap-kelip saja, jika menyalanya, pelita itu nanti akan menjadi obor besar sekali.

Sinarnya sangat kuatnya dan sampai pada hati sanubari seseorang di Taman Siswa, baik lelaki maupun perempuan. Masing-masing dri antara mereka akan melanjutkan gebyarnya api kebangsaan itu sampai sekalian orang yang berhubungan dengan mereka, lebih baik anak-anak didiknya.

Anak-anak nanti akan melanjutkan gebyarnya itu lagi sampai pada tempat yang kecilnya masing-masing. Begituh tebalnya sinar api kebangsaan, makin lama makin luas di kalangan bangsa kita Indonesia.⁷⁵

Sri Mangunsarkoro menganggap bahwa anak-anak adalah bagai “pelita”

an. Pelita yang meskipun awalnya masih kelap-kelip, tapi jika laki-laki



Astuti, “*Sri Mangunsarkoro*”, 61-62.

Astuti, “*Sri Mangunsarkoro*”, 64

dan perempuan (guru dalam hal ini) berkolaborasi, bersama-sama bekerja, mendidik para penerus bangsa itu, maka akan menyala juga api kebangsaan itu. Dengan jiwa yang menyala, maka anak-anak itu kemudian telah bersiap menjadi bagian dari tulang punggung memperjuangkan Indonesia Baru. Juga jika kolaborasi pengajaran itu baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi anak didik itu dan lingkungan sekitarnya. Perlahan jiwa nasionalisme itu merembes ke jiwa-jiwa yg lain.

Iniilah mudah-mudahan jadi sumbangan kita Taman Siswa kepada kemajuan bangsa dan tanah air kepada timbulnya Indonesia Baru, yang kebatinannya kembali seperti asalnya yaitu roh Indonesia sendiri yang mempunyai agem-ageman menurut aliran zaman. Di sinilah jujur kita sebagai bangsa, dengan kebudayaan kita sendiri... maka dalam dunia Taman Siswa betul-betul akan memenuhi kewajibannya menyerahkan badan kita dan membuang segala keinginan-keinginan untuk kebutuhan diri kita sendiri dan selalu pada malam dan siang kita harus mengingat-ingat kepada idam-idaman kita yang termulia, idaman Indonesia Baru.⁷⁶

Taman Siswa diharapkan dapat menjadi perguruan yang baik, yang menyumbangkan segala tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan baru, yakni Indonesia Baru. Untuk itu, sifat keegoisan tidaklah dibutuhkan. Yang penting adalah berjuang bersama-sama menyemai ilmu pengetahuan, kebudayaan dan nilai-nilai kebatinan yang luhur, agar kelak para pelita bangsa itu, tidak hanya menjadi pintar tapi berjiwa luhur, baik budi pekertinya, serta menyala semangat nasionalismenya.

Setelah Konferensi, Wanita Taman Siswa setuju terhadap usulan Sri Mangunsarkoro bahwa badan Wanita Taman Siswa perlu masuk bergabung dan menempatkan wakil-wakilnya dalam Majelis Luhur Taman Siswa. Penempatan wakil-wakil itu secara langsung adalah bagian dari bentuk kolaborasi. Setelah disahkan, WTS resmi memilih posisi yang sama dan sejajar dengan badan2 lain di Taman Siswa. Upaya yang dilakukan Sri Mangunsarkoro ini adalah karena ia memandang dan sadar bahwa perempuan harus berada dalam posisi dan kedudukan yang penting dan berpengaruh, juga ikut dalam penentuan kebijakan. Selain itu, penting agar di dalam Majelis Luhur Taman Siswa Majelis Luhur adalah juga perjuangan kepentingan perempuan dari basis pendidikan. Hal ini



Astuti, *“Sri Mangunsarkoro”*, 65

seakan menegaskan bahwa ruang gerak wanita tidaklah harus tertutup an terbatas sampai di wilyah domestik saja.

Tak hanya dengan guru laki-laki sinergitas dan kolaborasi harus diperkuat, menurut Sri Mangunsarkoro harus juga para perempuan dalam gerakan perempuan, bergerak secara kolektiv.

“... agar supaya kaum wanita jangan sampai menipu dirinya sendiri dan dengan demikian akhirnya menipu anak-anaknya dan cucunya sendiri, yang berarti menipu masyarakat Indonesia seluruhnya, maka baikah kita melihat sifat dan keadaan kesatuan pergerakan wanita Indonesia ini secara jujur dan ikhlas, dengan meninggalkn perasaan kesentimenan.

Jika kita berani berterus terang kepada diri kita sendiri maka selama seperempat abad itu kami harus mengakui bahwa kami baru dapat mencapai tingkat kemajuan yang berupa:

- a. Orientasi
- b. Eksperimen

Akan tetapi meskipun baru demikian, kesatuan pergerakan wanita indonesia selama seperempat abad itu mempunyai sifat yang positif yang karakteristik, yaitu dengan berpegang teguhnya terhadap ketinggian moraal, kesabaran dan ketabahan dari satu dan lain organisasi anggota kesatuan.

Moral tinggi, kesabaran dan ketabahan ituah yang menjamin keutuhan esatuan pergerakan wanita Indonesia selama seperempat dalam memperjuangkan tujunnya.

... justru dalam proses perpecahan di seluruh Indonesia merajaela seperti pada waktu sekarang ini, maka keutuhan kesatuan pergerakan wanita Indonesia yang teah berumur seperempat abad menjadi stimulans yang kuat dan nyata untuk keutuhan raakyaat, yang samat diperukan untuk kepentingan reolusi nasional kita.

Akan tetapi untuk menempati kedudukannya sebagai stimulans keutuhan kesabaran dan ketbahan yang ulet itu, maka tidk cukupkah, jika kita tidak mengisi kepandaian dan kemampuan kita di segaa lapangan hidup. Moral tinggi, ketabahan dan kesabaran saja belum dapat menajmin keutuhan masyarakat yng sempurna.⁷⁷

Dalam pidato ini, Sri Mangunsarkoro berusaha dengan jujur merefleksikan sejauh mana selama ini gerakan perempuan Indonesia, ada sisi lemah lesuh namun sisi kuatnya juga ada. Sri Mangunsarkoro memandang bahwa perempuan harus lebih berani dan percaya, melakukan gerakan kolektiv demi memperjuangkan terwujudnya suatu tatanan negara yang baru, Indonesi baru, Indonesia yang merdeka. Perpecahan dengan mudah ditemui oleh sesama kalangan, apabila jiwa dan hati tidak teguh daam memandang apa sebenarnya yang menjadi tujuan. Belum

ionnya, jika angin yang bertiup belum sanggup mempengaruhinya. Selain



Astuti, “*Sri Mangunsarkoro*”, lampiran 1. ,

sabar dan ulet, hal yang penting menurut Sri Mangunsarkoro adalah teruslah belajar dan mengisi diri dengan ilmu, kepandaian, keahlian, di segala bidang kehidupan. Dengan ini kelak dengan sendirinya akan membuka ruang-ruang bagi perempuan.

Dalam zaman pergerakan perempuan seperti sekarang ini, kaum ibu dalam mempraktekkan cita-citanya harus awas. Janganlah kaum ibu sampai melupakan kedudukannya sebagai perempuan. Oleh karena sangat terdorong akan mencari kemerdekaan diri dan hendak memperlihatkan kekuatan badan yang barangkali dapat juga mengenai kekuatan kaum laki-laki, dalam zaman pergerakan perempuan ini, janganlah kaum ibu bernafsu menuntut hak dan kemerdekaan yang khusus buat kaum laki-laki.

Dan kejadian ini seringkali berbareng dengan ‘meninggalkan hak dan kewajiban kaum ibu sendiri’.

....dengan keterangan-keterangan kami tentang pergerakan tadi, kami sama sekali tidak bermaksud melawan pergerakan perempuan Indonesia ini, W.T.S. juga menjadi satu bagian dari pergerakan itu.

Hanya saja kami hendak menyatakan tidak bersetuju kami dengan pergerakan perempuan, yang sangat mengemukakan kemerdekaan diri, tidak dengan suatu batasan. Menurut pandangan mereka, jika sudah ‘merdeka’ lain-lain tentu bisa baik.

Kami tidak percaya sama sekali kepada utopia-utopia ini. Sebab sebelumnya merdeka betul,, nanti gerakannya sudah melanggar batas-batas lain, seperti batas keperempuanan dan batas kesusilaan pergerakan perempuan yang begitu jalannya dan berbahaya buat masyarakat Indonesia di kemudian hari. Dan kita tidak akan dapat mengeluarkan perkataan ‘Indonesia Raya’ jika keadaan perempuan begitu rupa.

Saudara-saudara kaum ibu, jika kita menuntut hak dan kemerdekaan yang khusus buat laki-laki, tidak mungkin kita hanya menjadi laki-laki tiruan . Berapakah harganya perbuatan dari orang tiruan ?⁷⁸

Melihat anggapan ini, sepertinya Sri Mangunsarkoro menyoroiti hal-hal yang dianggapnya sebagai utopia. Menurutnya, ‘ruh’ sebagai perempuan itu tidak boleh dirusak dengan perbuatan yang merusak jiwa keperempuanan dan menginginkan dirinya seperti laki-laki. Perlu mengingat dengan baik kedudukan kita sebagai perempuan.

Kolaborasi, kerja sama dan sinergitas antara perempuan dan laki-laki, tidak hanya harus dilakukan di Perguruan Taman Siswa, tapi juga sangat perlu dilakukan di dalam rumah tangga. Kerja sama itu adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh perempuan dan laki-laki. Tanggung jawab itu berupa tugas untuk ‘...’ dan mengajar anak-anak. Tanggung jawab lain, pembagian beban kerja



Astuti, ‘Sri Mangunsarkoro’⁷¹

yang sesuai, tidak memberatkan apalagi menyiksa salah satunya dengan alasan gender.

... tak cukuplah, jika anak-anak murid kita hanya dapat didikan dari sekolahnya sahaja. Juga di ruahnya masing-masing ana-anak itu harus diberi pendidikan. Alangkah baiknya jika pendidikan dalam rumahnya dilaraskan pendidikan sekolahan.

Dengan begini, kita tak ragu-ragu lagi, pendidikan akan masuk dalam tulang sumsum anak kita.

Cita-cita itu belumlah tercapai, jika di dalam rumah hanya bapak yang mengerti kepada pendidikan Taman Siswa. Siapa yang sehari-hari bercampur dengan anak-anaknya. Si bu bukan? Jika pengaruh si ibu kepada anak-anaknya kurang baik, pendidikan sekolah tentu tak dapat hasil yang sebanyak-banyaknya.

Maka dari itu, Ibu wajib mengarti pendidikan Taman Siswa. Tetapi pada waktunya si bapak di rumah, pada waktunya si bapak tidak di dalam pekerjaannya, si bapak itulah wajiblah memperhatikan pendidikan-pendidikan anaknya dengan baik. Perhatian dari si bapak tidak hanya meringankan beban si ibu, akan tetapi juga menyempurnakan keadaan rumah tangganya, baik dalam pendidikan maupun dalam lain-lainnya.⁷⁹

Sri Mangunsarkoro mengingatkan bahwa pada dasarnya, yang banyak ditemui dalam rumah tangga dan pola pengasuhan di masyarakat, seorang anak akan menghabiskan waktu lebih lama dengan sang Ibu. Alangkah baiknya jika seorang ibu matang dan mampu dalam mendidik anak-anaknya di rumah, sembari anak-anak itu tetap didik juga di sekolah/ perguruan. Didikan yang baik di rumah oleh sang ibu dan ayah, akan memudahkan juga merasuknya ke dalam jiwa anak, pengajaran yang diberikan di sekolah.

... Wanita Taman Siswa dan kaum bapak Taman Siswa mempunyai satu buat keluarganya dan untuk menjalankannya, adalah pembagian pekerjaan seperti yang berikut:

1. Si Bapak (guru laki-laki) mengurus keadaan keluarga Taman Siswa berhubungan dengan dunia luar dan pendidikan laki-laki.
2. Si ibu (Wanita Taman Siswa) mengurus rumah tangga pondok asrama Taman Ssiwa dan pendidikan perempuan.

Tetapi meskipun begitu, ada juga masa kalanya, bahwa si bapak harus mengganti pekerjaan si ibu.

Di situlah letaknya, bahwa antara pekerjaan si ibu dan si bapak itu seringkali ada saling pengaruh. Dan situlah letaknya juga, bahwa pekerjaan ada saing pengaruh. Dan disitulah letaknya juga, bahwa pekerjaan si bapak dan pekerjaan si ibu, harus sama.

Akan tetapi penglihatan umum sampai sekarang masih saja menghinakan pekerjaan kaum ibu dan mempertinggikan pekerjaan kaum bapak. Dan sayang beribu sayang, kaum ibu sebagai kaum yang berhati halus, berhati lemah lembut katanya, ibu itu terima saja dan tunduk juga kepada pendapat umum itu.



Astuti, *“Sri Mangunsarkoro”*,⁶⁷

Tabiat lemah lembut atau tabiat halus tidak boleh dipergunakan salah. Sebab jika sah mempergunakan tabiat itu, tentu orang menjadi bertabiat takut dan tidak tahu akan keadannya. Tentu kepercayaan kepada kecakapan dan kekuatan diri sendiri akan hilang..

Perempuan harus bertabiat halus, akan tetapi harus yang mengandung kekuatan dan keberanian.

Sebab apakah terjadi, jika tidak begitu? Derajat dan kecakapan ibu dalam rumah tangga tentu menjadi rendah dan hina juga, oleh karena sugesti diri sendiri, turut dengan laki-laki dan lainnya. Kita, Wanita Taman Siswa hendak mencoba, memberi sugesti sekuat-kuatnya kepada diri kita sendiri, bahwa pekerjaan kita dalam rumah tangga dan keluarga Taman Siswa, adalah sama tingginya dan sama harganya dengan pekerjaan ayah bapak Taman Siswa⁸⁰

Tahun 1932, Sekolah-sekolah swasta dihadapkan dengan aturan pemerintah kolonial, yang dikenal dengan “Ordonansi Sekolah Liar” atau *Wilde Scholen Ordonantie*. Sebelumnya di tahun 1905, pemerintah kolonial telah mengeluarkan aturan ordonansi guru, namun dampaknya tidak begitu terlihat. Ordonansi Sekolah Liar ini mewajibkan seluruh sekolah swasta memiliki izin dari pemerintah kolonial. Dengan itu, maka sekolah-sekolah akan berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial serta akan mendapat subsidi pendidikan. Dari Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara, bersama dengan kelompok-kelompok seperti Muhammadiyah dan Budi Utomo, pun merespon dengan mengadakan kampanye nasional. *Volksraad* atau dewan rakyat juga ikut memberikan sikapnya dengan memprotes anggaran belanja pendidikan pemerintah kolonial. Februari 1933, pemerintah menghapus ordonansi sekolah liar tersebut.⁸¹ Taman Siswa pun tetap berjalan sebagai perguruan.

Sri Mangunsarkoro dalam kongres PPII yang ke-4 di Solo 1934, berpidato yang judulnya “Co-educatie dalam waktu birahi”.

...Pendidikan adalah satu bagian kehidupan kita, yang sebetulnya harus menjadi dasar atau fundament dari kehidupan dan penghidupan manusia segala keadaan yang terdapat, baik di dunia lahir maupun dunia batin, asal mulanya tentu harus kita cari dalam pendidikan juga. Meskipun ada kekuatan yang besar, jika dasar pendidikan tidak baik, maka kekuatan itu dapat menyempurnakan kehidupan manusia.⁸²

Agar seluruh organisasi perempuan hadir dalam Kongres Perempuan Indonesia II, maka PPII mengeluarkan maklumat yang isinya :



Astuti, “Sri Mangunsarkoro”, 68-69
Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, hlm 409.
Astuti, “Sri Mangunsarkoro”, 87.

... Karena “keinsyafan ibu bangsa”, itulah pekerjaan kita dalam rumah tangga akan menjadi pekerjaan berderajat tinggi, anak-anak kita yang kemudian akan merupakan bangsa Indonesia yg baru, yang lebih kuat dan mulia daripada bangsa kita skrg ini, pergulatan kita sekaum akan menjadi sumber kemajuan kita, kaum perempuan Indonesia: pengalaman kita atas keadaan bangsa akan menjadi pendorong supaya turut mencepatkan kemajuan dan memperbaiki penghidupan bangsa.

Karena keinsyafan ibu bangsa itulah hidup kita, perempuan Indonesia akan bertambah artinya, bertambah pentingnya, baik dalam rumah tangga, maupun dalam masyarakat. Kesempatan yang sebaik-baiknya membangunkan keinsyafan ibu bangsa itu adalah suatu Kongres Perempuan Indonesia”

Di samping itu, Wanita Taman Siswa tidak hanya beraktivitas dalam Majelis Luhur Taman Siswa dan mendidik perempuan di TS, namun WTS juga menunjukkan bahwa ia juga secara aktif terlibat dalam gerakan perempuan umum. Ini terbukti ketika Nyi. Hadjar Dewantara dari Wanita Taman Siswa menjadi bagian yang memprakarsai Kongres Perempuan 1928. Setelah itu, Wanita Taman Siswa juga semakin aktif dalam gerakan wanita umum, seperti PPPI.

Pergerakannya di Wanita Taman Siswa itulah yang membawa Sri Mangunsarkoro mengenal dunia pergerakan perempuan Indonesia. Ia kemudian kerap kali turut serta mendampingi Nyi Hadjar Dewantara dan mewakilinya sebagai bagian dari Wanita Taman Siswa. Pada tahun 1933-1935, Sri Mangunsarkoro dipercaya sebagai ketua Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Di tahun 1935, ia ditugaskan untuk memimpin Kongres Wanita Indonesia II sebagai ketua Kongres.

Pada tahun 1941, Sri Mangunsarkoro bersama dengan Ny. Sunaryo Mangunpuspito menghadap kepada Tuan Komisi Visman. Sri Mangunsarkoro menyatakan keinginannya, yaitu “Indonesia Merdeka”, suatu aksi radikal jika melihat periode itu, Indonesia masih di bawah kolonialisme Belanda.

2.2 Pendudukan Jepang: Emansipasi Tertahan

Pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang secara resmi menduduki wilayah Indonesia. Di bawah pemerintahan Jepang, Indonesia lalu dibagi menjadi tiga wilayah dengan pertimbangan pengelompokan serta kebijakan yang berbeda-beda.

Sumatera yang dianggap memiliki sumber-sumber yang baik, diletakkan kekuasaan Angkatan Darat ke-25. Jawa dan Madura sebagai wilayah yang bagus dalam hal politik namun lemah untuk menjanjikan pundi-pundi



uang, dipegang oleh Angkatan Darat ke-16. Sedangkan wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur, yang keduanya dianggap tidak progresif secara politik namun potensial dalam ekonomi, maka dikuasai oleh Angkatan Laut⁸³.

Dalam pendudukannya, Jepang membawa misi untuk mengentaskan sisa-sisa pengaruh penjajahan Barat di Indonesia, selain daripada kepentingan ekonomi. Dengan misi itu, dengan segera Jepang mengatur dan membatasi negara dan warga negara jajahannya sedemikian rupa. Mulai dengan kampanye di hadapan rakyat Indonesia menggunakan topeng kepura-puraan bahwa Jepang tak lain adalah saudara seperjuangan dalam perang untuk mengusahakan agar di Asia terbentuk suatu sistem yang baru⁸⁴ Tak hanya itu, Jepang berusaha menyingkirkan ‘pengetahuan sebelumnya’ dengan mengeluarkan aturan larangan penggunaan bahasa asing (Belanda dan Inggris) dan menganjurkan penggunaan Bahasa Jepang. Kesemua hal itu didukung dengan kebijakan Jepang yang memilih menggunakan jasa tokoh-tokoh pengajar ataupun seniman dan sastrawan yang *kontra* Belanda, untuk mempropagandakan Jepang lewat berbagai macam media, demi mencapai tujuannya itu.⁸⁵ Rencana Jepang selanjutnya adalah upaya untuk memobilisasi rakyat, dengan mula-mula membubarkan organisasi-organisasi (termasuk organisasi perempuan) dan perkumpulan yang ada, lalu membentuk organisasi - organisasi baru.

Di masa pendudukan Jepang ini, Gerakan Perempuan Indonesia kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya, apalagi untuk berkembang.⁸⁶ Perlahan namun berangsur-angsur, gerakan perempuan yang emansipatif, direpresi dan direduksi perannya ke arah domestik.

Pada April 1942, Badan Propaganda Jepang mencetuskan gerakan Tiga A dengan semboyan ‘Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia’. Badan yang dipimpin oleh Mr.Rd. Syamsuddin ini kemudian



Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 442.
Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 427
Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 427
Vreede-De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia*,. 161

dibubarkan dan digantikan oleh organisasi baru bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang dipimpin oleh Soekarno, Moh. Hatta, Ki. Hadjar Dewantara dan Kyai Haji Mansur. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memudahkan penyebaran cita-cita Asia Timur Raya, membakar semangat rakyat untuk berkorban, serta penguatan barisan di belakang garis peperangan.⁸⁷ Adapun organisasi ini terdapat bagian wanitanya ‘Barisan Pekerjaan Perempuan Putera’ yang ada di pusat dan tersebar di daerah-daerah. Adapun tugas dari bagian wanitanya ini supaya menjadi penyeenggara Pemberantasan Buta Huruf, mengerjakan kerajinan tangan dan menjahit, serta yang utama adalah menjadi juru penerang untuk ibu-ibu di Desa. Tujuannya yang lebih besar agar ibu-ibu desa tersebut mengarahkan anak laki-lakinya untuk menjadi kaki tangan Jepang dalam *Seinendan* dan *Keibodan*.⁸⁸ Tokoh-tokoh perempuan pergerakan seperti Ny. Sunaryo Mangunpuspito, Nyi. Sunaryati Sukemi, Ny. Sukanti Suryocondro, Ny. S.K Trimurti dan Ny. Burdah Yusupadi adalah mereka yang bertugas sebagai pengurus pusatnya.

Adapun di kalangan perempuan, sebagian dari organisasi-organisasi perempuan yang ada juga bergabung dalam Putera dengan nama *Fujinkai*. Fujinkai sendiri adalah organisasi perempuan bentukan Jepang yang diwajibkan bagi istri-istri Bupati dan Pamong Praja⁸⁹ dari tingkat atas sampai tingkat bawah, kecamatan, dan keanggotaannya terbuka bagi perempuan usia 15 tahun ke atas serta perempuan bangsa asing. Dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito, Fujinkai dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk membantu kebutuhan dan ketersediaan pangan Jepang dalam persiapan menuju Perang Dunia II. Dengan tujuan itu, oleh karenanya para anggota Fujinkai diberi berbagai pelatihan seperti pelatihan mempergunakan senjata, baris berbaris, kepalang merah, penyediaan dapur umum dan dapur keliling, kunjungan ke rumah sakit dan lain sebagainya.⁹⁰



Astuti, ‘Sri Mangunsarkoro’, 101
 Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 35.
 Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 38

Namun ternyata Putera tak bertahan lama, sebab para tokohnya dicurigai berencana membangkitkan semangat kebangsaan Indonesia dalam jiwa para pemuda. Dengan itu Putera dibubarkan pada awal Maret 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan Kebaktian Rakyat Jawa atau *Jawa Hokokai*. Lewat *Jawa Hokokai*, Pemerintah Jepang berencana menghimpun semua elemen sosial, ekonomi dan politik, yang semua ini akan diarahkan untuk kepentingan peperangan Asia Timur Raya. Dengan didirikannya *Jawa Hokokai*, *Fujinkai* yang sebelumnya adalah bagian dari Putera, harus meleburkan diri menjadi *Jawa Hokokai Fujinkai* sebagai bagian wanita dari *Jawa Hokokai*.

Berikut ini struktur pengurus *Jawa Hokokai Fujinkai* :

Ketua	: Ny. Sunaryo Mangunpuspito
Wakil Ketua I	: Ny. Ios Wiraatmaja
Wakil Ketua II	: Ny. Maskun
Penulis I	: Ny. Maryati Adnan
Penulis II	: Ny. Rosnah Jamin
Anggota	: Ny. Siti Maryam
Pembantu	: Ny. Sutarman
Ny. S.R. Tambunan	
Ny. Artinah Syamsuddin	
Ny. Hafni Abu Hanifah ⁹¹	

Adapun hal-hal yang diusakan oleh *Fujinkai* di antaranya adalah memantik perasaan cinta tanah air di kalangan wanita dengan wujud rela bekorban demi tanah air, memberantas pengangguran salah satunya dengan menghidupkan pelatihan kerajinan tangan dan industri pakaian di kalangan wanita, ikut serta mempersiapkan tenaga untuk penerangan, serta menggalakkan penanaman untuk tanaman penghasil bahan pangan dan sandang, seperti ubi, kapas dan lainnya.⁹² Menuju akhir pendudukan Jepang, rakyat dilanda serba-serbi kesukaran, sulitnya memperoleh sandang dan pangan, ditambah dengan fenomena *romusha*. Melihat fakta itu, *Fujinkai* turun ke lapangan menerangkan kepada kaum ibu agar melakukan penghematan. Kepada para *romusha*, *Fujinkai* bergerak mengumpulkan



G.A. Ohorella, dkk (1992), hlm. 37
G.A. Ohorella, dkk (1992), hlm 38.

pakaian-pakaian bekas namun layak pakai juga makanan, sembari merawat *romusha* yang sedang sakit.⁹³

Pada awal tim propaganda Jepang menginstruksikan agar perempuan membentuk *Fujinkai* dan bergabung di dalamnya, Ny. Sujatin Kartowijono telah menolak langsung ajakan itu. Sujatin mengatakan bahwa wanita-wanita Indonesia telah membentuk perkumpulan bahkan sebelum hadirnya Jepang. Dengan itu ia menuntut agar perkumpulan wanita Indonesia yang sudah ada itu diberikan kebebasan bergerak sesuai dengan iramanya. Sikap dari Sujatin itupun menuai respon dari Pemerintah Jepang. Sujatin diberikan peringatan yang bernada ancaman ‘‘*Hati-hati Kempetai*’’.⁹⁴

Seorang jurnalis perempuan, S.K Trimurti merespon kehadiran pemerintah Jepang dengan banyak menghadirkan tulisan kritis dalam surat kabar. Bersama Sayuti Melik suaminya, Trimurti mendirikan surat kabar *Pesat* yang kemudian ditutup paksa oleh Jepang. Mereka kemudian mendirikan lagi surat kabar *Sinar Baru*, namun Jepang kembali menutupnya. Keberadaan surat kabar semacam ini oleh pemerintah Jepang dianggap akan mengancam tatanannya. Mereka lalu ditangkap oleh *kempetai* dan ditahan di sebuah penjara di Semarang. Pada agenda pembelaan di depan *Kempetai*, SK. Trimurti menyatakan bahwa ia menaruh permusuhan terhadap sikap penjajah, bukan kepada Jepang ataupun Belanda. Ia lanjut berkata ‘‘...*Jikalau Jepang datang ke Indonesia untuk persaudaraan akan disambut gembira, akan tetapi kalau kedatangannya untuk menjajah akan dilawan*’’.⁹⁵

Berdirinya *Fujinkai* sebagai organisasi perempuan, ternyata tidak diminati oleh seluruh perempuan pergerakan. Satu di antaranya adalah Sri Mangunsarkoro yang berpendapat bahwa *Fujinkai* sama halnya dengan alat politik bentukan Jepang. Dalam keberjalanannya, *Fujinkai* dihadapkan dengan fasisme Jepang yang tidak tanggung-tanggung mengorbankan banyak perempuan dan anak-anak yang diculik,



Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 41.
Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 43.
Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 52.

lalu dijadikan budak sekaligus alat pemuas nafsu atau pelacur. Juga terhadap kenyataan *romusha* yang sama sekali tidak *humanis*, Fujinkai bahkan tidak bisa menanggapi apalagi mengkritisi.⁹⁶

Sri Mangunsarkoro yang tidak sepaham dengan Fujinkai, kemudian pada tahun 1942 mendirikan organisasi Kebudayaan bernama ‘Retna Budaya’. Pembentukan Retna Budaya ini juga sebagai bentuk kritiknya terhadap pemerintahan Jepang. Retna Budaya menggelar *campaign* -nya dengan memberikan pengajaran dan pelatihan seputar kesenian untuk perempuan, seperti memperkenalkan kepada anak-anak mengenai permainan tradisional dan lagu-lagu yang sifatnya nasional.⁹⁷ Dengan Retna Budaya, Sri Mangunsarkoro ingin menunjukkan bahwa belenggu yang diciptakan pemerintahan Jepang tidak dapat membatasi jiwa Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan seni dan kebudayaan. Retna Budaya juga turut mengusahakan untuk memantik kesadaran bagi kaum ibu sebagai pendidik anak/ generasi untuk menjaga kebudayaan dan nilai-nilai luhur. ‘Kebudayaan’ dipilihnya sebagai platform misi emansipatoris sebab pada masa pendudukan Jepang, kegiatan politik amat sensitif dan rawan terkena represi.

Saat pendudukan Jepang berakhir, tepatnya pada 12 Oktober 1945, Fujinkai pun bubar dan melebur ke dalam organisasi baru bernama Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) yang diketuai oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito. Perwani sendiri memilih mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai tugas pokoknya, yang diperjuangkan dengan berbagai jalan, seperti menyediakan dapur umum, membantu tugas Palang Merah Indonesia serta menolong para pejuang yang berada di garis depan.

2.3 Politik: Ruang Gerak Perempuan

Setelah kemerdekaan, di Jakarta, organisasi Retna Budaya berubah menjadi organisasi W Wanita Indonesia (Wani) pada Oktober 1945. Sebelumnya, Wani



Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 103.
Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, hlm 104.

berdiri salah satunya sebagai upaya mewujudkan permintaan Soekarno pada Ny. Suwarni Pringgodigdo (Ketua Wani) Agar dapat mempersiapkan tersedianya Tenaga-tenaga pemimpin perempuan yang dapat bekerja di ibu kota pemerintahan sekaligus mampu mengerjakan tugas sosial, seperti dapur umum⁹⁸. Pendirian Wani bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik sesegera mungkin, dengan menggunakan tenaga perempuan-perempuan sebagai basis kekuatan dan pertahanannya. Selaras dengan Sri Mangunsarkoro yang beranggapan bahwa ini adalah kesempatan dan memang sudah tepat waktunya untuk perempuan ikut serta Dalam mempertahankan kekuasaan negara dan merebut kemerdekaan dari kekuasaan Jepang.⁹⁹ Ada pun Wani mengusahakan perempuan ikut berjuang dan bertempur demi menjaga kemerdekaan, juga mengupayakan agar dalam KNIP atau lembaga perwakilan, dapat dimasukkan tokoh-tokoh perempuan pergerakan di dalam strukturnya.

Republik Indonesia yang baru “menetas” kala itu, telah menentukan pemimpin juga wilayah-wilayah kekuasaannya secara administratif dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Beriringan dengan itu didirikan pula lembaga dan elemen-elemen pemerintahan, salah satunya adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Awalnya tugas KNIP adalah membantu Presiden untuk melakukan kerja-kerjanya, namun hal ini dikritik sebagai pengkultusan kekuasaan tak terbatas seorang Presiden. Lembaga ini menjadi komponen penting untuk menetapkan garis haluan negara, yang akan berlangsung sampai sebelum pengakuan kedaulatan Republik oleh Belanda. Kaum perempuan pergerakan tak luput turut mengambil posisi dalam parlemen KNIP ini. Adapun dalam KNIP awal, perempuan - perempuan yang duduk sebagai anggota BP dan anggota biasa, yaitu Erna Djajadiningrat, Ny. Sunaryo Mangunpuspito, Ny. Suwarni Pringgodigdo, Mr. Maria Ulfah Santoso, Ny. Mudigdo, Emma Puradiredja, S.K. Trimurti, Nn. Susilowati, Sri Mangunsarkoro, Ny. Hadiprabowo dan Ny.Siti Danilah dan



Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 62
 Ohorella et al., *Peranan Wanita Indonesia*, 106

lainnya.¹⁰⁰ Yang menjadi khas dari masa revolusi kemerdekaan ini ialah perempuan telah semakin aktif untuk terlibat dalam politik, termasuk menggunakan hak pilih dan dipilihnya, mewakili partai atau organisasinya dalam ruang-ruang pengambilan keputusan dan sejenisnya.

Pada suatu hari, di saat Sjahrir cs, Sukarni, Sarmidi Mangunsarkoro dan Sri Mangunsarkoro mendominasi KNIP, mereka merencanakan perubahan tugas dan fungsi KNIP. Mereka membuat petisi yang ditanda tangani oleh 50¹⁰¹ orang anggota KNIP. Aksi tersebut direspon oleh Soekarno dengan dibukanya sidang KNIP. Sidang tersebut memutuskan bahwa sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut dalam menetapkan garis-garis haluan negara. KNIP lalu menjelma menjadi “parlemen” sementara.

Dalam KNIP, hierarki pemerintahan cukup tercerminkan, apalagi karena lembaga perwakilan macam DPR juga MPR belum ada. KNIP ini terdapat di tingkat daerah hingga pusat. KNIP pun langsung menjadi lembaga parlemen yang diisi oleh wakil-wakil organisasi, partai juga daerah. Untuk melibatkan kaum perempuan dan dengan alasan itu pula Ny. Suwarni Pringgodigdo dan 11 perempuan lainnya diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 25 september 1945. Tugasnya untuk menyiapkan pemimpin wanita, untuk penyelenggaraan dapur umum dan tugas sosial lainnya. Pada oktober 1945 dibentuklah organisasi Wanita Indonesia (Wani) yang dipimpin oleh Ny. Suwarni Pringgodigdo dan Ny. Erna Sutoto Jaya Diningrat. Dibantu oleh Maria Ulfah Santoso, Ny. Sukaesih Budiardjo, Ny. Sukardjo Wijoparnoto, dan Ny. Sutoto Jayadiningrat.¹⁰² Organisasi Wani didirikan dengan tujuan agar kaum perempuan ikut andil dalam mendukung perjuangan kemerdekaan dan revolusi nasional lewat kegiatan sosial seperti distribusi bantuan kemanusiaan dan pengelola dapur umum.



⁰ Noer dan Akbarsyah, *KNIP*, 366-367

¹ Noer dan Akbarsyah, *KNIP*, 28

Nampaknya negara baru merdeka ini cukup stabil, sampai pada mendaratnya pihak Sekutu yang mengikutsertakan pasukan Belanda juga NICA. Kedatangan mereka Di kota-kota besar seperti Jakarta, Malang, Bandung dan Surabaya ini disertai dengan tingkah laku yang memicu kemarahan pemuda juga pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang belum lama dibentuk itu. Sekutu yang awalnya datang untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan *AFNEI*, malah bertindak lebih dari itu. Imbasnya adalah teror dan *chaos* yang tak henti terjadi yang memuncak pada pertempuran-pertempuran besar seperti Perang Surabaya dan Pertempuran Ambarawa. Teror dan serangan dari tentara NICA bahkan menyasar ruang-ruang perempuan, misalnya dapur-dapur umum di Jakarta yang diorganisir oleh Wani.

Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, membuat tanggung jawab terhadap keamanan Indonesia dipindahtanggankan kepada Komando Pasifik Asia Tenggara. Semangat revolusi merambah dalam jiwa rakyat Indonesia. Pemuda dan pemudi ramai membentuk perkumpulan termasuk organisasi perempuan dan kelaskaran, baik yang independen maupun yang berafiliasi dengan partai politik bahkan sebagai *Underbow*. Mereka di antaranya adalah Perwari, PPI, Muslimat, Aisyiyah, Wanita Demokrat, Partai Wanita Rakyat, Barisan Buruh Wanita, juga organisasi kelaskaran dan militer seperti Laskar Wanita Indonesia (Laswi), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) bagian Putri dan lainnya.¹⁰³ Raminya bermunculan organisasi perempuan pada awal revolusi adalah potret orientasi kaum perempuan Indonesia yang semakin ingin melibatkan diri dalam ruang publik, khususnya dalam usaha bela negara dan meramalkan demokrasi, juga memperjuangkan kebangsaan dan hak-hak perempuan.

Keamanan dan kondusifitas di wilayah Republik menjadi sangat buruk akibat teror dan kekacauan yang terjadi. Menuju bulan-bulan akhir Tahun 1945, tentara Inggris telah menggempur Surabaya setelah memberikan ultimatum namun
ihkan. Pecahnya perang di Surabaya antara pihak Inggris dan pemuda juga



pasukan Republik terjadi pada 10 November. Pada 1 November 1945, Pemerintah Republik lewat Wakil Presiden Moh. Hatta, mengeluarkan "Manifesto Politik". Manifesto ini membuka ruang-ruang diplomasi dan kerja sama dengan pihak-pihak asing, bahkan Inggris dan Belanda sekalipun. Dalam konteks perpolitikan Republik dan kaitannya dengan persetujuan dengan pihak Inggris, Manifesto ini mengaminkan diplomasi dengan pihak Inggris demi memungkinkan kerja sama internasional. Meskipun harus diperhadapkan dengan semangat konfrontasi perlawanan bersenjata seperti pada para pemuda di Surabaya. Dengan ini pula, Manifesto Politik Hatta dikritik oleh Tan Malaka dalam brosurnya "Manifesto Jakarta". Tan Malaka Berpikir bahwa Republik Indonesia perlu menyadari kekuatan massa/ rakyat dan dengan itu menekankan perjuangan kemerdekaan yang revolusioner seperti konfrontasi langsung. Tidak ada diplomasi dengan pihak musuh, Tan Malaka menolak pendekatan diplomatis dan semacamnya. Perbedaan strategi mencapai dan mempertahankan kemerdekaan ini akan berlanjut sampai berakhirnya periode revolusi dan inilah salah satu warna yang dimiliki periode revolusi itu sendiri.

Setelah organisasi bentukan Jepang bubar bersama pamitnya Jepang dari negeri ini, kaum perempuan pergerakan merasa perlu mengusahakan ruang temu antara organisasi perempuan. Dengan itu, Ny. D. Susanto menginisiasi Kongres Perempuan yang diadakan di Klaten tanggal 15-17 Desember 1945. Ini adalah kongres pertama setelah proklamasi. Kongres diadakan dan mengambil Mr. Maria Ulfah Santoso sebagai ketuanya. Semangat untuk ber-Kongres ternyata belum disambut dengan begitu baik oleh semua kalangan pergerakan. Kongres hanya dihadiri oleh beberapa organisasi, di antaranya Wanita Taman Siswa, Perwani, Wani, Muslimat, Aisyiyah, Pemuda Putri Indonesia dan Wanita Katholik. Meski begitu, kongres menghasilkan suatu gebrakan bagi gerakan perempuan pasca kemerdekaan, yakni upaya menyatukan ideologi gerakan perempuan umum melalui nya organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) sebagai a Perwani dan Wani. Perwari pun dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro



dan Ny. Darmiyati M. Hadiprabowo.¹⁰⁴ Perwari mengambil beberapa hal sebagai urgensi programnya, yakni mendirikan dapur umum guna, mengurus pengungsian dan membuat panti/ penitipan kanak-kanak serta mendirikan koperasi untuk kaum ibu. Untuk persiapan bela negara, Perwari akan mencoba memberikan pelatihan bersenjata.¹⁰⁵

Di penghujung tahun 1945, Jakarta sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Republik, tidak lagi memungkinkan kondisinya akibat teror NICA. Untuk itu, pada awal Januari 1946, pusat pemerintahan Republik kemudian dialihkan ke Yogyakarta. Menyesuaikan dengan irama revolusi itu, Kowani juga menempatkan Sekretariatnya di Yogyakarta

Di Solo, tepatnya pada 25-26 Februari 1946, konferensi perkumpulan-perkumpulan wanita diadakan. Kongres ini akhirnya menghasilkan keputusan yakni dibentuknya Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sebagai suatu resmi. Kowani akan menjadi payung bagi beberapa organisasi perempuan yang tergabung di dalamnya. Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Kowani dipimpin oleh Ny. Sujatin Kartowijono. Menurut Sujatin, pembentukan lembaga Kowani tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan dan keinginan kaum perempuan untuk ikut serta dalam perjuangan itu. Kongres ikut menuntut “Kemerdekaan 100%” dan tidak ragu menyatakan berada sepenuhnya di belakang pemerintah¹⁰⁶.

Maklumat yang ditanda tangani oleh Hatta kini menimbulkan respon yang ramai di khalayak politikus. Bangkit dan menjamur partai-partai, fungsi KNIP berubah menjadi parlemen sementara yang berhak ikut dalam menetapkan haluan negara. Sistem pemerintahan parlementer, merubah tatanan supremasi Soekarno sebagai Presiden. Kini, Soekarno adalah kepala negara, namun jalannya pemerintahan dipegang oleh Seorang Perdana Menteri. Pada tanggal 14 November 1945, Kabinet Parlementer terbentuk, dengan Sjahrir sebagai Perdana Menteri, sekaligus menteri



⁴Mutiah Amini, *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928–1998)* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), 84..

⁵ Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, hlm 37.

⁶Amini, *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia*, 86.

dalam dan luar negeri. Kabinet ini diisi dengan para petinggi partai-partai seperti PNI, Masjumi, Pesindo dll.

Di antara ketegangan-ketegangan yang muncul di akhir 1945- awal 1946 adalah munculnya kembali tokoh kawakan, Tan Malaka. Pada Desember 1945, Tan Malaka menerbitkan brosur tulisannya yang berjudul ‘‘Moeslihat’’. Dalam *Moeslihat*, Tan Malaka menawarkan gagasan yang berbeda mengenai politik diplomasi, di antaranya:

- a. Diplomasi adalah jalan untuk memberitahukan pada dunia luar bahwa Republik adalah suatu negara yang merdeka dan punya kehormatan diri.¹⁰⁷
- b. Diplomasi Republik Indonesia tidak boleh mengemis dan menerima serta-merta. Diplomasi RI harus disandarkan pada perjuangan merebut.¹⁰⁸

Karena itu, lagi menurut Tan Malaka, diperlukan suatu organisasi sebagai platform berjuang yang dapat menghimpun semua kalangan. ‘‘Organisasi Rakyat Berjuang’’adalah label dari platform perjuangan itu. Organisasi Rakyat Berjuang ini memiliki tuntutan perjuangan, yakni ‘‘Merdeka 100%’’ dan membentuk masyarakat yang sosialis *berdasarkan Industri Berat Nasional*.

Inilah program Organisasi Rakyat Berjuang :

1. Mendirikan Pemeruntahan Berjuang oleh rakyat berjuang
2. Mendirikan Laskar Rakyat
3. Membagikan tanah pada tani melarat
4. Melaksanakan hak pekerja mengatur produksi
5. Melaksanakan Ekonomi Berjuang
6. Membersihkan Indonesia dari tantara asing
7. Melucuti tantara Jepang¹⁰⁹

Jika nantinya ternyata rakyat Indonesia tidak seluruhnya bergabung dalam Organisasi Rakyat Berjuang dan tidak tertarik atau mampu membentuk industri berat nasional, maka rakyat itu boleh keluar dari platform dan mendirikan partai/ organisasi baru. Tan Malaka dalam *Moeslihat* ini juga menegaskan pendiriannya



⁷ Tan Malaka, *Moeslihat* (Djakarta: Penerbit Republik, 1945), accessed 2025, https://archive.org/details/116597_TAN_MALAKA_muslihat.

⁸ Tan Malaka, *Moeslihat*, 5.

⁹ Tan Malaka, *Moeslihat*, 16.

terhadap sistem kepartaian yang menurutnya lebih bagus jika hanya ada satu partai saja, yakni Partai Murba.¹¹⁰ Dengan itu dapat diminimalisir konflik yang mungkin timbul antar partai dan parlemen.

Istilah atau konsep “Merdeka 100%” ini ramai disebutkan khususnya pasca Diadakannya Konferensi kelompok oposisi berlabel “Persatoean Perjoeangan” pada awal Januari 1946. Tan Malaka dan simpatisannya adalah penggagas dari pertemuan itu. Untuk mengawal mosi “Kemerdekaan 100” itu, Kongres membentuk pula Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia yang akan berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro.¹¹¹

Bersamaan dengan Kongres Kowani di Solo Pada Februari 1946, KNIP melangsungkan sidang Pleno di Malang. Hasil dari sidang Pleno tersebut adalah direduksinya *power* Presiden lewat ditetapkan sistem parlementer. Disini, Kabinet Sjahrir I meletakkan jabatan, namun Sjahrir dipilih kembali sebagai Perdana Menteri dengan harapan dapat meredam ketegangan. Sebelumnya, Sjahrir mundur akibat tekanan dan oposisi dari pihak Persatoean Perjoeangan.



⁰ Tan Malaka, *Moeslihat*, 11.

¹ Departemen Penerangan, *Buku Peringatan 30 Tahun*, 38.